

Tabel 3-94 Penentuan sifat penting dampak kegiatan operasional unit PLTU terhadap perubahan pendapatan.

No	Faktor Penentu Dampak Penting	Sifat Penting Dampak	Keterangan
1	Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan	p	Jumlah manusia yang terkena dampak minimal adalah sebanyak 130 orang tenaga kerja lokal dari 5 desa studi akan terserap langsung sebagai tenaga kerja di PLTU Cirebon Kapasitas 1 X 1.000 MW. Sedangkan dari peluang usaha di sektor lain seperti penyediaan makanan, minimal akan dibutuhkan 12 rumah makan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 35 orang. Dan di sektor jasa kos kosan, minimal akan ada 153 kamar yang disewakan oleh sekitar ± 30 orang warga yang mengusahakan usaha kos-kosan. Dengan demikian total manusia yang terkena dampak adalah sebanyak 195 rumah tangga yang akan menerima dampak positif langsung dari kegiatan Tahap Operasional. Dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki 4 orang anggota keluarga, maka akan ada warga sebanyak 780 orang yang menerima dampak positif secara tidak langsung. Jumlah manusia yang terkena dampak positif (langsung dan tidak langsung) ini diprediksi akan meningkat lebih besar lagi jika dirinci dengan peluang usaha di bidang lainnya, diperkirakan dapat mencapai ± 1000 orang.
2	Luas wilayah persebaran dampak	p	Luas wilayah sebaran dampak minimal di 5 desa studi, dan dapat meluas hingga lintas kecamatan dan Kabupaten Cirebon.
3	Lama nya dampak berlangsung	p	lamanya dampak berlangsung tergolong lama (± 24 tahun).
	Intensitas dampak	tp	Intensitas dampak jika dibandingkan dengan peluang berusaha di Tahap Operasi relatif jauh lebih kecil
4	Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak	p	Terdapat 2 komponen lain yang terkena dampak turunan yaitu perubahan pendapatan dan persepsi dan sikap masyarakat.
5	Sifat kumulatif dampak	p	Dampak bersifat kumulatif.
6	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	tp	Dampak dapat berbalik jika Tahap Operasi sudah selesai.
7	Kriteria lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).	-	-

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, perubahan pendapatan pada kegiatan operasional unit PLTU masuk kategori **dampak penting (dp)**.

3.3.3.7 Persepsi dan sikap masyarakat

Besaran Dampak

Dampak persepsi dan sikap masyarakat ini merupakan dampak turunan dari dampak : 1). Perubahan pendapatan, 2). Perubahan komunitas biota laut, dan 3). Gangguan penyakit yang bersumber dari kegiatan operasional PLTU.

Berdasarkan hasil prakiraan dampak perubahan pendapatan diketahui bahwa dampak tersebut disimpulkan menjadi dampak positif penting. Dimana diperkirakan rumah tangga yang terkena dampak langsung dari peningkatan pendapatan adalah sebanyak 195 KK atau sekitar 780 orang jika dihitung bersama anggota keluarganya. Berdasarkan informasi tersebut maka diperkirakan pada Tahap Operasi minimal akan terdapat 780 orang yang memiliki persepsi dan sikap yang positif terhadap kegiatan. Jika dibandingkan dengan total penduduk di 5 desa studi yaitu sebanyak 24.772, maka yang dipastikan memiliki persepsi positif sebesar 3%.

Hasil prakiraan dampak terhadap gangguan kesehatan diketahui bahwa dampak tersebut disimpulkan sebagai dampak penting sehingga akan memberikan dampak turunan yang bersifat negatif terhadap perubahan persepsi dan sikap masyarakat.

Dengan menggunakan analogi dengan persepsi masyarakat terhadap keberadaan PLTU Cirebon Kapasitas 1x660 MW pada Tahap Operasional, diketahui bahwa terdapat sebesar 25,1% masyarakat (responden) yang memberikan penilaian (persepsi) positif bahwa keberadaan PLTU Cirebon Kapasitas 1x660 MW itu pada kategori baik dan cukup baik. Sedangkan persentase masyarakat (responden) yang menyatakan keberadaan PLTU Cirebon Kapasitas 1x660MW pada kategori kurang baik adalah sebesar 64,1%, dan sisanya sebesar 10,8% tidak memberikan jawaban. Sehingga dapat diprediksi bahwa kegiatan operasional PLTU Cirebon Kapasitas 1 X 1.000 MW ini jika dalam pengelolaan lingkungannya tidak melakukan suatu perubahan yang mendasar dari apa yang telah dilakukan pada operasional PLTU Cirebon Kapasitas 1x660 MW, maka persepsi masyarakat terhadap kegiatan operasional PLTU Cirebon Kapasitas 1 X 1.000 MW relatif tidak akan jauh berbeda dari persepsi masyarakat pada kegiatan operasional PLTU Cirebon Kapasitas 1x660 MW.

Sifat Penting Dampak

Berdasarkan pedoman penetapan tingkat kepentingan dampak, maka dampak kegiatan operasional unit PLTU terhadap persepsi dan sikap masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-95 Penentuan sifat penting dampak kegiatan operasional unit PLTU terhadap persepsi dan sikap masyarakat.

No	Faktor Penentu Dampak Penting	Sifat Penting Dampak	Keterangan
1	Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan	p	Jumlah manusia yang terkena terkena dampak positif dari kegiatan operasional PLTU terutama berupa peningkatan pendapatan yang berdampak turunan pada perubahan persepsi dan sikap masyarakat yang bersifat positif minimal sebanyak 195 rumah tangga yang akan menerima dampak positif langsung dari kegiatan Tahap Operasional. Dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki 4 orang anggota keluarga, maka akan ada warga sebanyak 780 orang yang menerima dampak positif secara tidak langsung. Jumlah manusia yang terkena dampak positif (langsung dan tidak langsung) ini diprediksi akan meningkat lebih besar lagi jika dirinci dengan peluang usaha di bidang lainnya, diperkirakan dapat mencapai \pm 1000 orang.
2	Luas wilayah persebaran dampak	p	Luas wilayah sebaran dampak positif adalah meliputi wilayah desa studi yang warganya direkrut menjadi tenaga kerja atau yang mendapat peluang berusaha pada Tahap Operasional. Sedangkan luas sebaran dampak yang bersifat negatif meliputi batas ekologis yang terpapar oleh dampak perubahan komunitas biota laut dan gangguan kesehatan.
3	Lama nya dampak berlangsung	p	lamanya dampak berlangsung tergolong lama yaitu selama \pm 25 tahun.
	Intensitas dampak	P	Intensitas dampak tergolong sedang,

No	Faktor Penentu Dampak Penting	Sifat Penting Dampak	Keterangan
4	Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak	tp	Tidak terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak turunan.
5	Sifat kumulatif dampak	p	Dampak bersifat kumulatif.
6	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	tp	Dampak perubahan persepsi masyarakat dapat berbalik.
7	Kriteria lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).	-	-

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, persepsi dan sikap masyarakat pada kegiatan operasional unit PLTU masuk kategori **dampak penting (dp)**.

3.3.3.8 Gangguan penyakit

Besaran Dampak

Emisi yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat meningkatkan konsentrasi polutan di udara (partikulat dan gas). Hasil dari prakiraan kualitas udara emisi tersebut masih dibawah baku mutu lingkungan berdasarkan PP RI No. 41/1999 dan dapat mencapai 5 desa terdekat (Kanci, Kanci Kulon, Waruduwur, Astanamukti dan Pangarengan). Menurut WHO, karakteristik, konsentrasi dan waktu paparan polutan akan mempengaruhi risiko terhadap kesehatan. Nilai konsentrasi debu (PM_{10}) yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan yaitu sebesar $50 \mu g/m^3$, $PM_{2.5}$ sebesar $25 \mu g/m^3$, SO_2 $20 \mu g/m^3$ dan NO_2 $40 \mu g/m^3$.

Dampak kesehatan yang timbul dari kegiatan operasional unit PLTU dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan baik akut maupun kronis. Emisi dari cerobong jika terhirup dapat menyebabkan ISPA dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan asma, bronchitis kronis dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

Rata-rata angka prevalensi ISPA di 3 Kecamatan (Mundu, Astanajapura dan Pangenan) yang dilewati kendaraan untuk mobilisasi peralatan dan material sebanyak 145 kasus per 1.000 penduduk, Pneumonia 1.5 kasus/1.000 penduduk dan Astma 1.2 kasus/1000 penduduk. Dengan adanya kegiatan ini diperkirakan terjadi peningkatan kasus penyakit saluran pernafasan (ISPA) pada kelompok rentan yang tinggal di 5 desa tersebut diatas sebanyak 59 kasus per 1.000 penduduk-tahun dan pada jangka waktu panjang dapat berisiko terjadinya penyakit sistem pernafasan seperti asma, bronchitis, PPOK sebesar 49 kasus/1.000 penduduk-tahun. Jumlah ini bisa melebihi dari yang diperkirakan sering dengan penambahan jumlah penduduk dan penyakit pada sistem pernafasan disebabkan oleh multi faktor, baik kondisi fisik udara, kuman patogen dan juga virus (Depkes RI). Faktor lain yang dapat mempengaruhinya seperti keturunan, status gizi, kebiasaan merokok di dalam ruangan, pengelolaan sampah dengan cara dibakar serta ventilasi ruangan. Oleh karena itu, polusi udara bukan penyebab tunggal terhadap penyakit pada sistem pernafasan.

Sifat Penting Dampak

Berdasarkan pedoman penetapan tingkat kepentingan dampak, maka dampak kegiatan operasional unit PLTU terhadap gangguan penyakit dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-96 Penentuan sifat penting dampak kegiatan operasional unit PLTU terhadap gangguan penyakit.

No	Faktor Penentu Dampak Penting	Sifat Penting Dampak	Keterangan
1	Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan	p	Masyarakat yang tinggal di wilayah studi (Desa Kanci, Waruduwur, Kanci Kulon, Astanamukti dan Pangarengan) yang berdekatan dengan lokasi PLTU
2	Luas wilayah persebaran dampak	p	Keluhan/gangguan pada sistem pernafasan umumnya akan terjadi di daerah yang berdekatan dengan lokasi PLTU (Desa Kanci, Waruduwur, Kanci Kulon, Astana Mukti dan Pangarengan).
3	Lama nya dampak berlangsung	p	Gangguan pada saluran pernafasan ini bersifat akut (dapat sembuh dalam beberapa hari) dan bersifat kronis (setelah beberapa tahun tergantung pada karakteristik individu).
	Intensitas dampak	p	Gangguan pada saluran pernafasan akut dapat hilang timbul seiring dengan terpapar oleh partikulat/gas dan faktor lainnya. Gangguan pada saluran pernafasan kronis lama dan menetap
4	Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak	tp	Dampak turunan akibat meningkatnya gangguan pada sistem pernafasan baik akut/kronis akan berpotensi terhadap persepsi masyarakat yang negatif.
5	Sifat kumulatif dampak	p	Dampak bersifat kumulatif, karena partikulat/gas yang terhirup dapat mengakibatkan efek kronis pada saluran pernafasan.
6	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	p	Dengan berhentinya operasional PLTU, kualitas udara akan kembali pada kondisi semula, tetapi efek kronis akan menetap pada penderita.
7	Kriteria lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).	tp	Pengobatan yang sudah modern dapat menurunkan tingkat keparahan pada gangguan pada system pernafasan kronis.

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, gangguan penyakit pada kegiatan operasional unit PLTU masuk kategori **dampak penting (dp)**.

3.3.4 Penyimpanan sementara abu batubara

3.3.4.1 Penurunan Kualitas Udara Ambien

Besaran Dampak

Abu batubara (*fly ash* dan *bottom ash*) yang dihasilkan dalam sistem pembakaran batubara akan akan disimpan sementara dalam *ash silo* dengan kapasitas penyimpanan 3.000 m³ (10.800 ton). Abu batubara tersebut akan diambil secara kontinyu dengan menggunakan truk kapsul dengan ritasi 1 – 2 mobil per jam untuk dibawa langsung ke pemanfaat yang mendapatkan izin contohnya seperti pabrik semen. Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak penurunan kualitas udara ambien akibat bangkitan partikulat dari pengoperasian kendaraan pengangkut abu batubara.

Prakiraan besaran bangkitan partikulat (TSP) dihitung dengan menggunakan rumus dispersi TSP untuk sumber garis terbatas seperti diterapkan pada kegiatan mobilisasi peralatan dan material. Pada kegiatan ini diasumsikan maksimum sebanyak 2 ritasi/jam dengan rata-rata berat kendaraan adalah 20 ton, maka diperoleh peningkatan konsentrasi TSP seperti tertera pada Tabel 3-97 berikut ini.

Tabel 3-97 Prakiraan besaran emisi TSP.

Parameter	Jarak Reseptor (m)							Baku Mutu	Unit
	10	25	50	100	250	500	1000		
TSP/debu	107,53	85,27	61,48	37,97	12,98	5,65	1,57	230	µg/m ³

Keterangan: * PPRI No. 41/1999.

Berdasarkan Tabel 3-97, diperkirakan peningkatan konsentrasi TSP akibat pengoperasian kendaraan pengangkut abu batubara masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Sifat Penting Dampak

Berdasarkan pedoman penetapan tingkat kepentingan dampak, maka dampak kegiatan penyimpanan sementara abu batubara terhadap penurunan kualitas udara ambien dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-98 Penentuan sifat penting dampak kegiatan penyimpanan sementara abu batu bara terhadap penurunan kualitas udara ambien.

No	Faktor Penentu Dampak Penting	Sifat Penting Dampak	Keterangan
1	Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan	tp	Manusia yang terkena dampak adalah pemukiman terdekat dengan jalur kendaraan pengangkut abu batubara.
2	Luas wilayah persebaran dampak	tp	Luas sebaran partikulat menyebar di sekitar badan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut abu batubara.
3	Lama nya dampak berlangsung	tp	Kegiatan berlangsung selama beroperasinya PLTU Cirebon kapasitas 1x1.000 MW. Namun demikian penurunan kualitas udara ambien tidak akan berlangsung lama karena bangkitan partikulat hanya terjadi ketika kendaraan pengangkut melintas dengan ritasi maksimum 2 kendaraan per jam.
	Intensitas dampak	tp	Intensitas dampak partikulat tertinggi terjadi pada jarak <10 meter dari sumber dampak namun masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
4	Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak	tp	Jika tidak dikelola dengan baik, dampak turunan yang berpotensi terkena dampak adalah kesehatan masyarakat (sekunder) yang berdampak lanjutan lagi ke persepsi masyarakat (dampak tersier).
5	Sifat kumulatif dampak	tp	Dampak tidak bersifat kumulatif, karena emisi partikulat akan langsung terdispersi ke udara ambien.
6	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	tp	Mengingat udara emisi akan terdispersi dalam ruang udara ambien, maka dampak akan berbalik setelah udara emisi tersebut terdispersi. Bangkitan partikulat akan kembali ke kondisi semula ketika kendaraan pengangkut telah lewat menjauh.
7	Kriteria lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).	tp	Dampak penting yang ditimbulkan dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Guna meminimalisir dampak penurunan kualitas udara, pemrakarsa telah menyiapkan SOP pengelolaan lingkungan diantaranya penyimpanan abu batubara di silo, pemilihan kendaraan layak operasi, pengaturan waktu operasional kendaraan, penyiraman debu jalan menggunakan (<i>water spraying truck</i>) dan menghilangkan debu pada roda kendaraan menggunakan <i>wheel washing machine</i> .

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, kegiatan operasional unit PLTU pada Tahap Operasi PLTU Cirebon kapasitas 1x1.000 MW terhadap penurunan kualitas udara ambien masuk ke dalam kategori **dampak tidak penting (dtp)**.

3.3.4.2 Persepsi dan sikap masyarakat

Besaran Dampak

Dampak persepsi dan sikap masyarakat ini merupakan dampak turunan (dampak tersier) dari dampak sekunder gangguan penyakit dan dampak primer penurunan kualitas udara ambien yang bersumber dari kegiatan penyimpanan sementara abu batubara.

Berdasarkan hasil prakiraan dampak gangguan kesehatan diketahui bahwa dampak tersebut disimpulkan sebagai dampak tidak penting sehingga diperkirakan tidak akan berdampak turunan terhadap dampak perubahan persepsi dan sikap masyarakat.

Sifat Penting Dampak

Berdasarkan pedoman penetapan tingkat kepentingan dampak, maka dampak kegiatan penyimpanan sementara abu batubara terhadap persepsi dan sikap masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-99 Penentuan sifat penting dampak kegiatan penyimpanan sementara abu batu bara terhadap persepsi dan sikap masyarakat.

No	Faktor Penentu Dampak Penting	Sifat Penting Dampak	Keterangan
1	Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan	tp	Manusia yang terkena dampak adalah pemukiman terdekat dengan jalur kendaraan pengangkut abu batubara.
2	Luas wilayah persebaran dampak	tp	Luas sebaran partikulat menyebar di sekitar badan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut abu batubara.
3	Lama nya dampak berlangsung	tp	Kegiatan berlangsung selama beroperasinya PLTU Cirebon kapasitas 1x1.000 MW. Namun demikian kegiatan ini sudah ada SOP
	Intensitas dampak	tp	Intensitas dampak tergolong kecil
4	Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak	tp	Tidak terdapat komponen lingkungan lain yang terkena dampak turunan.
5	Sifat kumulatif dampak	tp	Dampak tidak bersifat kumulatif
6	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	tp	Dampak perubahan persepsi masyarakat dapat berbalik.
7	Kriteria lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).	-	-

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, kegiatan operasional unit PLTU pada Tahap Operasi PLTU Cirebon kapasitas 1x1.000 MW terhadap persepsi dan sikap masyarakat termasuk ke dalam kategori **dampak tidak penting (dtp)**.

3.3.4.3 Gangguan penyakit

Besaran Dampak

Kegiatan penyimpanan sementara abu batubara khususnya abu dasar (*bottom ash*) dapat mengakibatkan meningkatnya konsentrasi partikulat diudara, sebaran partikulat yang masuk ke pemukiman penduduk terdekat diperkirakan konsentrasinya masih dibawah baku mutu lingkungan. Sedangkan Abu terbang (*fly ash*) disimpan sementara dalam *ash silo*, sehingga dampak kesehatan masyarakat (ISPA) dari kegiatan ini tidak terlalu signifikan. Hal ini karena jarak pemukiman terdekat dengan batas lokasi tapak proyek jauh (>750 meter).

Sifat Penting Dampak

Berdasarkan pedoman penetapan tingkat kepentingan dampak, maka dampak kegiatan penyimpanan sementara abu batubara terhadap gangguan penyakit dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-100 Penentuan sifat penting dampak kegiatan penyimpanan sementara abu batu bara terhadap gangguan penyakit.

No	Faktor Penentu Dampak Penting	Sifat Penting Dampak	Keterangan
1	Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/ atau kegiatan	tp	Tidak ada penduduk yang terkena sebaran abu batubara (jarak terdekat lokasi pemukiman dengan lokasi PLTU <750 meter).
2	Luas wilayah persebaran dampak	tp	Daerah sekitar yang berjarak <500 meter dari fasilitas PLTU.
3	Lama nya dampak berlangsung	tp	Dampak terhadap saluran pernafasan tidak signifikan, ISPA sendiri akan sembuh dengan atau tanpa pengobatan.
	Intensitas dampak	tp	Gangguan pada saluran pernafasan dapat hilang timbul seiring dengan terpapar oleh partikulat dan faktor lainnya.
4	Banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak	tp	Tidak ada komponen lingkungan lain yang terkena dampak.
5	Sifat kumulatif dampak	tp	Dampak tidak bersifat kumulatif, belum dapat mengakibatkan efek kronis.
6	Berbalik atau tidak berbaliknya dampak	tp	Dengan selesainya operasional PLTU, kualitas udara akan kembali pada kondisi semula, hal ini akan diiringi dengan tidak adanya keluhan pada saluran pernafasan.
7	Kriteria lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).	tp	Pengobatan yang sudah modern dapat menurunkan dengan cepat keluhan pada saluran pernafasan.

Ditinjau dari 7 kriteria sifat penting dampak, kegiatan operasional unit PLTU pada Tahap Operasi PLTU Cirebon kapasitas 1x1.000 MW gangguan penyakit termasuk ke dalam kategori **dampak tidak penting (dtp)**.

Tabel 3-101 Matriks sifat penting dampak kegiatan pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW.

No	Jenis Kegiatan (Sumber Dampak)	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Kriteria Dampak							Dampak penting/ dampak tidak penting
			1	2	3	4	5	6	7	
A	Tahap Pra Konstruksi									
A1	Pengadaan lahan	Perubahan mata pencaharian	p	p	p	p	p	tp	-	dp
		Perubahan pendapatan	p	p	p	p	p	p	-	dp
		Persepsi dan sikap masyarakat	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
A2	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	Peningkatan kesempatan kerja	p	p	p	p	p	tp	-	dp
		Persepsi dan sikap masyarakat	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
B	Tahap Konstruksi									
B1	Mobilisasi peralatan dan material	Penurunan kualitas udara ambien	p	tp	p	p	tp	tp	tp	dp
		Peningkatan kebisingan	p	p	p	p	tp	tp	tp	dp
		Peningkatan peluang usaha	p	p	p	p	p	p	-	dp
		Gangguan aktivitas nelayan melaut	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
		Perubahan pendapatan masyarakat*	p	p	p	tp	p	-	-	dp
		Perubahan pendapatan nelayan*	tp	tp	p	tp	p	-	-	dp
		Persepsi dan sikap masyarakat	p	p	p	tp	-	-	-	dp
		Gangguan penyakit	p	tp	p	tp	tp	tp	tp	dp
		Peningkatan lalu lintas darat	p	p	p	p	tp	tp	tp	dp
B2	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Penurunan kualitas udara ambien	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Peningkatan kebisingan	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Peningkatan erosi dan sedimentasi	p	p	tp	p	p	p	tp	dp
		Peningkatan debit air larian/limpasan	tp	tp	p	p	tp	tp	tp	dp
		Penurunan kualitas air sungai	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Penurunan kualitas air laut	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Perubahan komunitas flora darat	p	tp	p	p	tp	p	tp	dp
		Perubahan komunitas fauna darat	tp	tp	p	tp	tp	tp	p	dp
		Perubahan komunitas biota sungai	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Perubahan komunitas biota laut	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Persepsi dan sikap masyarakat	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
Gangguan penyakit	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp		
B3	Pembangunan jalan akses	Penurunan kualitas udara ambien	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Peningkatan kebisingan	p	p	tp	p	tp	tp	tp	dp
		Persepsi dan sikap masyarakat	p	tp	tp	tp	p	tp	-	dp
		Gangguan penyakit	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
B4	Pembangunan	Peningkatan kebisingan	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp

No	Jenis Kegiatan (Sumber Dampak)	Komponen Lingkungan Terkena Dampak	Kriteria Dampak							Dampak penting/ dampak tidak penting
			1	2	3	4	5	6	7	
		Persepsi dan sikap masyarakat	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
B5	Pembangunan dermaga	Penurunan kualitas air laut	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Perubahan komunitas biota laut	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Gangguan aktivitas nelayan melaut	p	p	p	p	p	tp	-	dp
		Gangguan aktivitas budidaya kerang	p	p	p	p	p	tp	-	dp
		Perubahan pendapatan	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
		Persepsi dan sikap masyarakat	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
B6	Pelepasan tenaga kerja Tahap Konstruksi	Perubahan pendapatan	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
		Peningkatan keterampilan	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
B7	Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasional	Peningkatan kesempatan kerja	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
		Perubahan persepsi dan sikap masyarakat	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
C	Tahap Operasi									
C1	Operasional dermaga (bongkar muat batubara)	Penurunan kualitas air laut	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Perubahan komunitas biota laut	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Gangguan aktivitas nelayan melaut	tp	tp	p	tp	p	tp	-	dp
		Persepsi dan sikap masyarakat	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
C2	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Penurunan kualitas udara ambien	tp	tp	p	p	p	tp	tp	dp
		Persepsi dan sikap masyarakat	tp	tp	p	tp	p	tp	-	dp
		Gangguan penyakit	p	p	p	tp	p	p	tp	dp
C3	Operasional unit PLTU	Penurunan kualitas udara ambien	tp	tp	p	p	p	tp	tp	dp
		Peningkatan kebisingan	tp	tp	p	tp	tp	tp	tp	dp
		Penurunan kualitas air laut	tp	p	p	p	tp	tp	tp	dp
		Perubahan komunitas biota laut	tp	p	p	p	tp	tp	tp	dp
		Peningkatan peluang usaha	p	p	p	p	p	tp	-	dp
		Perubahan pendapatan	p	p	p	p	p	tp	-	dp
		Persepsi dan sikap masyarakat	p	p	p	tp	p	tp	-	dp
		Gangguan penyakit	p	p	p	tp	p	p	tp	dp
C4	Penyimpanan sementara abu batubara	Penurunan kualitas udara ambien	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Perubahan persepsi masyarakat	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp
		Gangguan penyakit	tp	tp	tp	tp	tp	tp	tp	dtp

ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Oleh PT Cirebon Energi Prasarana

BAB IV

EVALUASI SECARA

HOLISTIK TERHADAP

DAMPAK

LINGKUNGAN



PT CIREBON ENERGI PRASARANA

Wisma Pondok Indah Tower 3, Lt. 25

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V – TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan Telp : 021 2932 7990, Fax : 021 2932 7991

Email : amdal@cepr.co.id

4.0 EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN

4.1 TELAHAH TERHADAP DAMPAK PENTING

Pada bagian ini menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana usaha dan/atau kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup. Pengambilan keputusan dampak penting dilakukan dengan cara:

- Jika satu kriteria dari tujuh kriteria dianggap penting, maka Dampak Penting Hipotetik (DPH) menjadi Dampak Penting (**dp**). Apabila tidak ada kriteria dari tujuh kriteria yang dinyatakan penting (**p**), maka DPH menjadi Dampak Tidak Penting (**dt**). Untuk menentukan kriteria dalam tujuh kriteria itu penting (**p**) atau tidak penting (**tp**) menggunakan **data rona lingkungan awal dan prakiraan besaran dampak**; dan
- Untuk melakukan evaluasi secara holistik, maka digunakan metode bagan alir.

Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi dampak penting hipotetik (DPH) tersebut dapat diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama;
2. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan; dan
3. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (*area of concerns*).

Penggunaan metode bagan alir dalam evaluasi dampak secara holistik mempertimbangkan sifat kumulatif dampak (dampak yang sama disebabkan oleh dua atau lebih kegiatan yang berbeda). Kajian sifat kumulatif dampak dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penentuan sifat penting dampak, pada kriteria #3 (lamanya dampak berlangsung) dan kriteria #5 (sifat kumulatif dampak). Dampak-dampak yang terjadi pada ruang dan waktu yang sama atau berbeda juga dikaji untuk menentukan keputusan akhir sifat penting dampak. Dengan demikian, kajian evaluasi dampak secara holistik, selain telah memperhitungkan aspek rona lingkungan dan hasil prakiraan dampak, juga telah memperhitungkan dampak dari berbagai kegiatan, serta kaitan dengan dampak pada parameter lain. Dengan menggunakan bagan alir, panduan untuk memutuskan apakah dampak akhir menjadi PENTING atau TIDAK PENTING adalah sebagai berikut:

1. Apabila dua jenis dampak memiliki tingkat kepentingan dampak tp (tidak penting) namun jika dievaluasi dalam satu kesatuan ruang dan waktu terdapat akumulasi dampak maka kedua jenis dampak tersebut dinyatakan sebagai **DAMPAK PENTING (DP)** penting dan harus dikelola.
2. Apabila dua jenis dampak memiliki tingkat kepentingan dampak tp (tidak penting) dan p (penting) namun:
 - a) Jika evaluasi dalam satu kesatuan ruang dan waktu terdapat akumulasi, dampak dengan kriteria tp dan p dinyatakan sebagai **DAMPAK PENTING (DP)** dan dikelola; dan

- b) Jika evaluasi dalam satu kesatuan ruang dan waktu tidak terdapat akumulasi dampak maka dampak dengan kriteria p tetap dikelola tetapi dampak dengan kriteria tp tidak dikelola;
1. Apabila dua jenis dampak memiliki tingkat kepentingan dampak tp (tidak penting) namun dalam evaluasi jika dalam satu ruang dan waktu tidak terdapat akumulasi dampak maka kedua dampak tersebut dinyatakan **TIDAK PENTING (TP)** dan tidak dikelola.

Apabila DPH diputuskan menjadi **DAMPAK PENTING (DP)**, maka akan dikelola dalam dokumen RKL dan dipantau dalam dokumen RPL.

Apabila DPH diputuskan menjadi **DAMPAK TIDAK PENTING (DTP)** namun daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah tidak memenuhi, maka akan dikelola dalam dokumen RKL dan akan dipantau dalam dokumen RPL.

Apabila DPH diputuskan menjadi **DAMPAK TIDAK PENTING (DTP)** dan daya dukung dan daya tampung lingkungan masih memenuhi, maka tidak akan dikelola dalam RKL dan tidak dipantau dalam RPL.

Keterangan:

- **p**: dampak penting pada setiap kriteria dampak pada tujuh kriteria pada tahap penentuan sifat penting dampak
- **tp**: dampak tidak penting pada setiap kriteria dampak pada tujuh kriteria penentuan sifat penting dampak
- **dp**: dampak penting dari hasil evaluasi tujuh kriteria dampak
- **dtp**: dampak tidak penting dari hasil evaluasi tujuh kriteria dampak.
- **DP**: DAMPAK PENTING dari hasil evaluasi secara holistik.
- **DTP**: DAMPAK TIDAK PENTING dari hasil evaluasi secara holistik

Hasil evaluasi dampak penting akan digunakan sebagai dasar untuk membuat arahan penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

4.1.1 Tahap Pra Konstruksi

Pada Tahap Pra Konstruksi kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yaitu pengadaan lahan dan penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi. Kegiatan pengadaan lahan menimbulkan dampak negatif penting terhadap komponen sosial yaitu mata pencaharian, perubahan pendapatan, persepsi dan sikap masyarakat. Adapun dampak positif penting ditimbulkan dari kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi yaitu kesempatan kerja serta persepsi dan sikap masyarakat.

Kegiatan pengadaan lahan seluas 195 hektar, akan berdampak kepada perubahan atau lebih tepatnya hilangnya mata pencaharian penduduk sekitar yaitu sebanyak ± 601 orang pada musim kemarau dan sebanyak ± 292 orang pada musim penghujan. Sedangkan terkait perubahan pendapatan pada kegiatan pengadaan lahan diperkirakan dalam satu tahun, total kehilangan pendapatan bersih masyarakat yang menggarap lahan dan menjadi buruh di lahan seluas 195 ha adalah sebesar Rp 1.911.531.000.

Kegiatan pengadaan lahan diperkirakan menimbulkan dampak perubahan persepsi masyarakat yang bersifat negatif. Hal ini dikarenakan kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian mereka selama ini yang berbasiskan pada lahan (sebagai petani tambak garam) secara turun temurun. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang berkaitan dengan rencana kegiatan atau proyek yang akan dipersepsikan

Kegiatan pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW akan meningkatkan kesempatan kerja di 5 desa wilayah studi (Desa Kanci, Kanci Kulon, Waruduwur, Astanamukti dan Pengarengan) antara 2,7% hingga 5.1% jika dibandingkan dengan tidak adanya kegiatan pembangunan PLTU tersebut. Kegiatan rekrutmen tenaga kerja pada Tahap Konstruksi dengan proporsi tenaga kerja lokal sebesar 49,8% atau sebanyak 2.440 orang, diprediksi akan berdampak signifikan terhadap perubahan persepsi dan sikap masyarakat terhadap proyek yang bersifat positif penting.

4.1.2 Tahap Konstruksi

Tahap Konstruksi terdiri dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material, pematangan lahan dan penyiapan areal kerja, pembangunan jalan akses, pembangunan PLTU dan fasilitasnya, pembangunan dermaga, pelepasan tenaga kerja pada Tahap Konstruksi dan penerimaan tenaga kerja pada Tahap Operasional.

Kegiatan mobilisasi peralatan dan material akan menggunakan jalur darat dan jalur laut. Kegiatan ini dimungkinkan akan menyebabkan penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan dengan dampak turunan gangguan penyakit/kesehatan di jalur mobilisasi darat serta mengakibatkan gangguan aktifitas melaut dengan dampak turunan berupa perubahan pendapatan nelayan pada jalur lalu-lintas laut.

Penurunan kualitas udara ambien diperkirakan dengan meningkatnya kadar partikulat dari pengoperasian kendaraan pengangkut alat-alat berat dan material untuk kebutuhan konstruksi sipil. Dampak kualitas udara dari kegiatan ini relatif tinggi yang berdampak turunan terhadap gangguan penyakit meskipun konsentrasi partikulat akan kembali ke kondisi semula/dapat berbalik ketika kendaraan pengangkut telah lewat menjauh. Sementara intensitas kebisingan yang ditimbulkan berdampak terhadap pemukiman di sekitar jalur mobilisasi meskipun bersifat semi kontinyu dan akan turun seiring dengan bertambahnya jarak sumber kebisingan. Dan tingkat kebisingan sangat dipengaruhi oleh peningkatan lalu lintas yang berasal dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material.

Mobilisasi material dapat dilakukan baik dari arah timur maupun dari arah barat dari tapak proyek. Namun demikian, guna mengurangi dampak mobilisasi material akan diarahkan melalui jalur tol Palimanan-Kanci dan keluar di pintu tol Kanci, kemudian masuk ke jalan pantura dari arah timur, kemudian langsung menuju tapak proyek.

Pada kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap peningkatan erosi dan sedimentasi, peningkatan debit air larian/limpasan, perubahan komunitas flora darat, perubahan komunitas fauna darat dan persepsi dan sikap masyarakat.

Kegiatan pematangan lahan dilakukan dalam jangka waktu 7 bulan pada lahan seluas 40,03 hektar, diperkirakan akan meningkatkan limpasan permukaan. Selain itu, Kegiatan pematangan lahan juga menimbulkan dampak berupa penurunan komunitas flora darat yaitu menyebabkan hilangnya jenis-jenis vegetasi tertentu dan berkurangnya kerapatan serta tutupan vegetasi khususnya sebagian kecil mangrove yang berada di bagian utara lokasi rencana kegiatan/usaha dan berdampak turunan yaitu perubahan komunitas fauna darat yang ada di dalamnya (merupakan satu mata rantai kehidupan).

Pemrakarsa berencana membangun jalan akses dengan dua jalur, yang pertama berada di sebelah barat tapak proyek dan jalur kedua dari sebelah timur tapak proyek. Kegiatan ini diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif penting terhadap peningkatan kebisingan yang berdampak turunan terhadap persepsi masyarakat di sekitar area jalur pembangunan jalan akses khusus-nya di jalur perbatasan antara Desa Kanci dan Kanci Kulon. Selain itu kegiatan ini akan menimbulkan persepsi dan sikap positif dari warga karena akan penggunaan tenaga kerja lokal sebanyak 90% dari total 100 orang tenaga kerja yang dibutuhkan.

Pembangunan PLTU dan fasilitas penunjang memungkinkan mengubah persepsi dan sikap masyarakat yang merupakan dampak turunan dari dampak peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kebisingan. Pada tahap kegiatan ini akan merupakan puncak tertinggi yang dapat dicapai dari persepsi positif dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan. Hal ini berkaitan dengan perekrutan 1.400 tenaga kerja lokal dan adanya peluang usaha warung makan yang dapat menimbulkan kesempatan kerja baru bagi sekitar 168 tenaga kerja serta terdapat pula peluang usaha di bidang penyediaan ± 263 unit usaha kontrakan rumah.

Pembangunan dermaga meliputi pembangunan dermaga sementara dan dermaga permanen. Kegiatan tersebut diprediksi akan menimbulkan dampak negatif penting terhadap aktifitas nelayan melaut terutama dalam hal semakin jauhnya jarak tempuh perahu nelayan yang akan berpengaruh terhadap konsumsi BBM dan pendapatan nelayan secara umum. Adapun aktifitas budidaya kerang akan terganggu akibat dari relokasi atau pemindahan sejumlah unit rumpon yang akan berdampak turunan terhadap perubahan pendapatan nelayan sehingga memungkinkan persepsi dan sikap masyarakat cenderung menjadi negatif penting.

Pelepasan tenaga kerja pada Tahap Konstruksi menandakan hilangnya mata pencaharian di Tahap Konstruksi yang berdampak turunan terhadap perubahan tingkat pendapatan, karena pada tahap ini dibutuhkan tenaga kerja yang umumnya membutuhkan keahlian tertentu. Disisi lain, Pelepasan tenaga kerja pada Tahap Konstruksi berdampak positif penting terhadap peningkatan keterampilan/keahlian terutama akan sangat dirasakan oleh tenaga kerja konstruksi yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang konstruksi pembangunan PLTU. Jenis peningkatan keahlian dapat beragam, mulai dari keahlian dalam pengelolaan keamanan (SATPAM), keterampilan mengelas, keterampilan menyambung pipa, memasang peralatan listrik, instrumen, mengoperasikan kendaraan dan alat berat dll.

Penerimaan tenaga kerja pada Tahap Operasi akan berdampak positif dan negatif pada peningkatan kesempatan kerja yang berdampak turunan terhadap perubahan persepsi dan sikap masyarakat. Secara parsial, kegiatan penyerapan tenaga kerja meningkatkan kesempatan kerja dan memberi manfaat langsung kepada sekitar ± 140 tenaga kerja baru. Namun secara holistik karena adanya kegiatan pelepasan tenaga kerja pada Tahap Konstruksi, maka diperkirakan terdapat ± 1.400 warga yang terkena dampak negatif langsung dari adanya kegiatan pada Tahap Konstruksi.

4.1.3 Tahap Operasi

Pada Tahap Operasi kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yaitu kegiatan operasional dermaga (bongkar muat batubara), penyimpanan batubara di *stockyard*, dan operasional unit PLTU.

Kegiatan operasional dermaga (bongkar muat batubara) dengan panjang dermaga $\pm 2,7$ km diperkirakan akan berdampak negatif penting terhadap gangguan aktifitas nelayan melaut. Meskipun demikian, perubahan jalur nelayan dengan kapal ukuran kecil tidak terlalu berpengaruh dikarenakan kapal-kapal kecil tanpa tiang bendera masih dapat melintasi celah antar tiang pancang dermaga. Gangguan diperkirakan akan terjadi terhadap lalu lintas nelayan kapal besar karena dengan adanya dermaga, maka nelayan yang berangkat dari arah Desa Waruduwur perlu melambung ke utara sebelum menuju ke arah timur. Namun dengan adanya dermaga eksisting di PLTU Cirebon Kapasitas 1x660MW, perbedaan jarak tempuh sangat kecil.

Secara umum pengoperasian dermaga bongkar muat batu bara ini akan menimbulkan kekhawatiran yang lebih besar bagi masyarakat nelayan, terutama karena dampaknya akan bersifat kumulatif dari dampak-dampak negatif yang muncul pada operasional PLTU Cirebon Kapasitas 1x660 MW.

Penyimpanan batubara di *stockyard* diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif penting pada komponen penurunan kualitas udara ambien akibat dari emisi fugitif yang terdispersi ke udara ambien yang akan berdampak turunan pada gangguan penyakit serta persepsi dan sikap

masyarakat, akan tetapi di sekeliling stockyard akan dipasang Wind Breaker yang berfungsi meredam jumlah partikulat yang mungkin bisa terbawa angin.

Operasional unit PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW memberikan dampak negatif penting terhadap penurunan kualitas udara ambien, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air laut, gangguan penyakit serta menimbulkan dampak positif penting pada peningkatan peluang usaha, perubahan pendapatan serta persepsi dan sikap masyarakat.

Penurunan kualitas udara ambien akan berlangsung secara terus menerus selama beroperasinya PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW dan emisi gas buang ditimbulkan dari berbagai sumber emisi. Begitupula dengan peningkatan kebisingan dihasilkan dari berbagai sumber kebisingan. Selain itu terdapat akumulasi dampak dari operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1.000 MW dengan PLTU Cirebon Kapasitas 660 MW yang saat ini telah beroperasi. Dari kedua dampak tersebut dapat menimbulkan dampak turunan berupa gangguan penyakit.

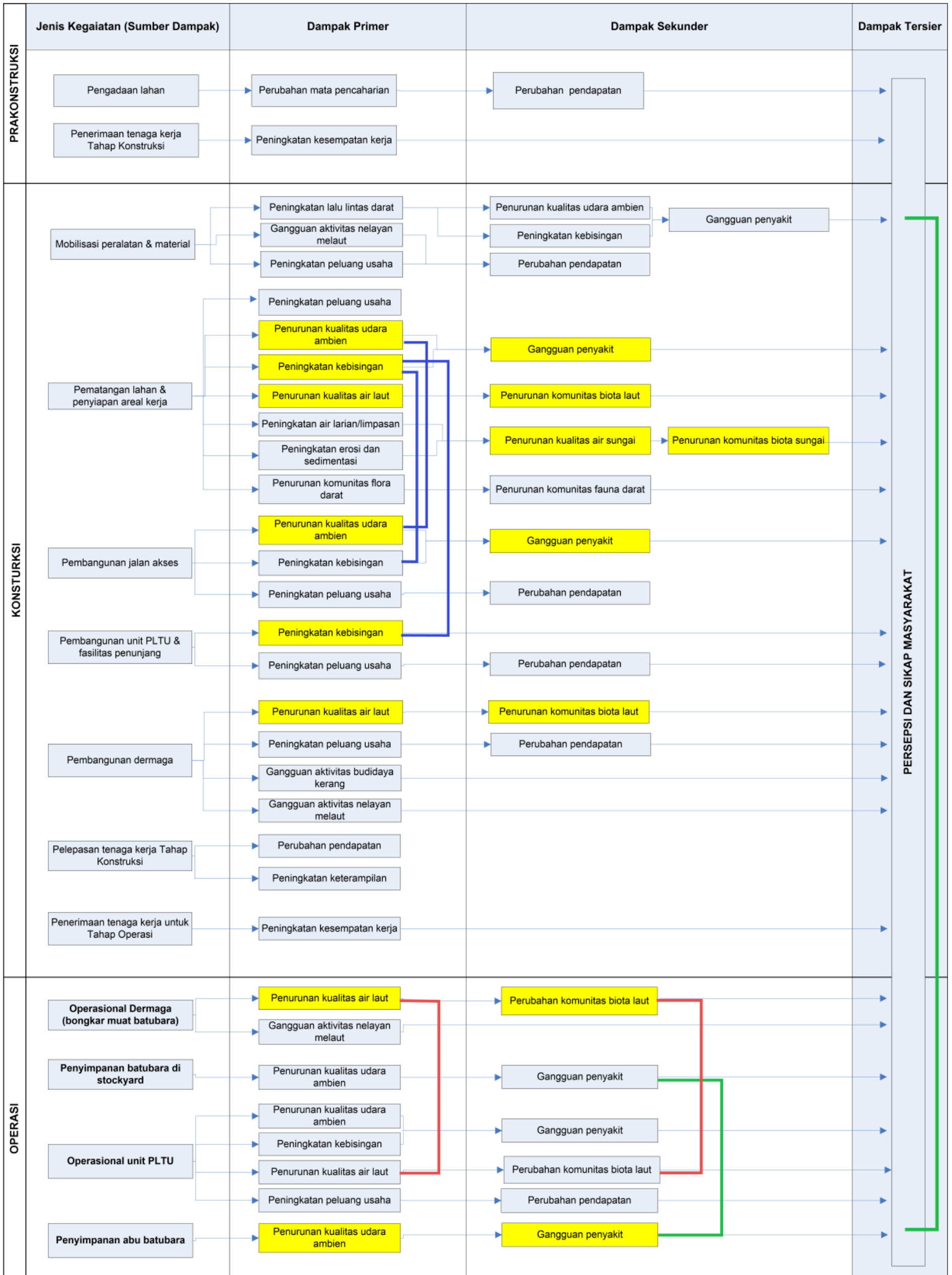
Dampak negatif penting lainnya yang ditimbulkan oleh beroperasinya unit PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW yaitu penurunan kualitas air laut yang disebabkan oleh peningkatan suhu air, peningkatan konsentrasi klorin dan TSS. Khusus untuk parameter klorin bebas dan TSS, air limbah dari PLTU akan dialirkan ke IPAL.

Selain itu, operasional unit PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW memberikan dampak positif penting terhadap peningkatan peluang usaha dan perubahan pendapatan, selain berupa dampak langsung dari terserapnya tenaga kerja, terdapat pula peluang berusaha yang bersifat tidak langsung yaitu tumbuhnya peluang berusaha baru mulai dari usaha penyediaan warung makan dan toko kelontong selama Tahap Operasi maupun usaha di bidang lainnya.

4.2 EVALUASI SECARA HOLISTIK

Berdasarkan hasil evaluasi dampak secara holistik menggunakan bagan alir (Gambar 4-1) terdapat dampak yang terjadi dalam ruang dan waktu yang sama yaitu kemungkinan terjadinya gangguan penyakit/kesehatan akibat kegiatan penyimpanan batubara di *stockyard* dan penyimpanan sementara abu batubara di Tahap Operasi sehingga dikategorikan sebagai **DAMPAK PENTING (DP)** dan akan dikelola. Pada kegiatan operasional dermaga dan operasional PLTU pada Tahap Operasi terdapat dampak yang terjadi dalam satu kesatuan waktu namun tidak terjadi dalam ruang yang sama yaitu penurunan kualitas air laut dan perubahan komunitas biota laut sehingga tidak terjadi akumulasi dampak. Berdasarkan hal tersebut, pada kegiatan operasional dermaga, dampak penurunan kualitas air laut tetap dikategorikan sebagai dampak tidak penting (tidak dikelola). Sama halnya dengan penurunan kualitas air laut, dampak terhadap perubahan komunitas biota laut hanya terjadi dalam satu kesatuan waktu sehingga tetap dikategorikan sebagai dampak tidak penting (tidak dikelola).

Beberapa tahapan kegiatan juga mengakibatkan dampak yang terjadi dalam satu kesatuan ruang yaitu kegiatan pematangan lahan, penyiapan areal kerja dan pembangunan unit PLTU dan fasilitas penunjangnya. Dampak tersebut berupa penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan. Berdasarkan kriteria evaluasi secara holistik, dampak penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan termasuk dampak tidak penting (tidak dikelola). Semua tahapan kegiatan menimbulkan dampak terhadap perubahan persepsi dan sikap masyarakat. Pada kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja dan pembangunan jalan akses merupakan dampak yang terjadi pada kesatuan ruang dan waktu yang sama pada Tahap Konstruksi. Selain itu perubahan persepsi dan sikap masyarakat pada kegiatan penyimpanan batubara, operasional PLTU, dan penyimpanan sementara abu batubara terjadi pada kesatuan ruang dan waktu yang sama pada Tahap Operasi. Oleh karena itu dampak perubahan persepsi dan sikap masyarakat masing-masing dikategorikan sebagai dampak penting (dikelola).



Keterangan:



Gambar 4-1 Evaluasi Dampak Holistik Pembangunan PLTU Kapasitas 1x1.000 MW.

4.3 ARAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Arahan pengelolaan dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan. Sedangkan arahan pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan, kecenderungan, dan tingkat kritis dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

4.3.1 Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi adalah cara-cara memanfaatkan teknologi yang sudah ada dan terbukti handal yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup. Pendekatan teknologi pada rencana kegiatan mengacu kepada kebijakan pemrakarsa sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik dan benar, serta menjadi mitra yang baik bagi masyarakat di sekitar PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW. Pendekatan teknologi difokuskan kepada pengelolaan kualitas udara, kebisingan, air limpasan (*run-off*), dan kualitas air untuk permasalahan yang diakibatkan oleh kegiatan pada Tahap Konstruksi dan Tahap Operasi, sehingga dapat menerapkan opsi pengelolaan terbaik (*best available technology*).

4.3.2 Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah. Untuk itu akan melaksanakan sebagai berikut:

- Menjalin interaksi sosial yang baik dengan masyarakat sekitar lokasi proyek diantaranya dengan sosialisasi rencana kegiatan sebelum proyek dilakukan;
- Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja daerah setempat sesuai dengan keahlian dan pendidikan;
- Melakukan pendataan secara rinci terkait kepemilikan dan penguasaan lahan di areal lahan yang dibebaskan;
- Menerapkan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang merupakan bagian penting PT. CEPR dalam menjalankan bisnis operasionalnya agar tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi serta untuk mempercepat penciptaan/ peningkatan usaha baru; dan
- Melakukan evaluasi internal terhadap efektifitas komunikasi yang telah dibangun dengan masyarakat dan capaian program yang telah direncanakan dari kegiatan PLTU Cirebon Kapasitas 660 MW.

Untuk mencapai sasaran diatas, PT. CEPR akan melakukan skala prioritas serta dengan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan finansial perusahaan. Dalam penyusunan program-program CSR/*Community Development* akan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan di daerah operasi agar tujuan tersebut dapat tercapai serta sinergitas antara perusahaan, pemerintah daerah serta masyarakat dapat terbangun dengan solid.

4.3.3 Pendekatan Institusi

Persepsi masyarakat yang tumbuh di masyarakat saat ini adalah masih adanya sebagian ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan yang disebabkan oleh berbagai faktor serta kekhawatiran masyarakat terhadap dampak yang diakibatkan oleh operasional PLTU. Kunci dari pengelolaan terhadap masalah ini adalah harus ada keterbukaan komunikasi antara perusahaan

dan masyarakat melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait yang diakui di masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menekan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yaitu:

- Menciptakan jalinan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal dalam penciptaan peluang usaha baru untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
- Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial Kabupaten Cirebon terkait perencanaan dan implementasi program CSR yang berbasis kebutuhan masyarakat;
- Membangun dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan para pemimpin formal/non-formal, tokoh-tokoh masyarakat; dan *stakeholder* terkait lainnya, baik swasta, akademisi, pemerintah daerah maupun masyarakat;
- Membangun lembaga yang menangani mekanisme pengaduan masyarakat yang dikelola di tingkat desa dan kecamatan dengan melibatkan unsur-unsur pihak pabrik, pemerintah lokal dan lembaga perwakilan masyarakat. Selanjutnya isu prioritas (penting) dari aduan masyarakat akan dibahas bersama secara reguler di lembaga pengaduan tersebut sehingga dapat menangani dampak sosial yang mungkin terjadi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat; dan
- Melaporkan hasil penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) secara berkala kepada instansi terkait.

4.4 REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN

Penilaian terhadap aspek kelayakan lingkungan dari suatu rencana kegiatan dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa keberadaan suatu proyek tersebut secara kumulatif dapat menimbulkan nilai manfaat (dampak positif) yang lebih besar daripada nilai kerugian (dampak negatif) yang ditimbulkan terutama ditinjau dari aspek lingkungan hidup setelah aspek teknis dan aspek ekonomi.

Penentuan kelayakan lingkungan hidup atas rencana usaha dan/atau kegiatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup seperti disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4-1 Kriteria yang menjadi dasar pertimbangan di dalam penilaian kelayakan lingkungan.

Kriteria	Pernyataan Kelayakan Lingkungan Hidup
Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Pengembangan PLTU Cirebon 1x1.000 MW dan SUTET 500 KV dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2127/9.1/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017, menyampaikan hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini. 2. Rencana Pengembangan PLTU Kabupaten Cirebon telah dimuat pada Lampiran VA tentang Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik huruf M Nomor 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 3. Berdasarkan hal tersebut di atas rencana pengembangan PLTU Cirebon 1x1.000 MW dan SUTET 500 KV di Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan izin pemanfaatan ruangnya dapat didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 ini.
Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Kebijakan perusahaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (SDA) yang berlaku.
Kepentingan pertahanan keamanan.	Rencana kegiatan ini merupakan jenis usaha yang bersifat vital dan strategis dengan teknologi tinggi dan merupakan upaya diversifikasi pembangunan energi listrik untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, khususnya sistem ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali (JAMALI).
Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi dan Pascaoperasi usaha dan/ atau kegiatan	Telah dilakukan prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya serta kesehatan masyarakat mulai dari Tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, dan Operasi Kegiatan Pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW. Hasil prakiraan dampak secara lebih rinci tercantum dalam Sub-bab 3.1 (Tahap Pra Konstruksi), Sub-bab 3.2 (Tahap Konstruksi) dan Sub-bab 3.3 (Tahap Operasi).
Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif.	Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting Hipotetik (DPH) telah dikaji sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi (tertuang dalam Sub-bab 4.2 ANDAL). Dengan demikian dapat diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap seluruh aspek komponen yang dikaji.
Kemampuan pemrakarsa dan/ atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial,	Pemrakarsa memiliki kemampuan dalam penanggulangan dampak penting negatif melalui pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW ini akan dilengkapi dengan berbagai alat kontrol emisi untuk mengurangi emisi gas buang, diantaranya pemasangan sistem <i>Flue Gas Desulphurization</i> (FGD) yang berfungsi mengikat SO ₂ dari hasil pembakaran batubara. Sementara debu yang dihasilkan akan ditangkap oleh unit <i>electrostatic precipitator</i> (ESP). Untuk pengolahan limbah cair akan menggunakan teknologi <i>Waste water treatment</i>

Kriteria	Pernyataan Kelayakan Lingkungan Hidup
dan kelembagaan	<p><i>plant</i> (WWTP).</p> <p>Pendekatan sosial dan kelembagaan menjadi prioritas utama dalam penanggulangan dampak negatif terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya.</p>
Rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	<p>Dalam kajian ini sudah dilakukan telaahan sosial yang terkait dengan prakiraan dan evaluasi dampak sosial. Rencana kegiatan mempengaruhi nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat tetapi dapat dikelola untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang timbul. Pemrakarsa akan melakukan pengelolaan dan pemantauan mata pencaharian, kesempatan kerja, peluang berusaha, pendapatan masyarakat serta persepsi dan sikap masyarakat melalui forum komunikasi dengan masyarakat terkena dampak sesuai dengan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
Rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	<p>Dalam kajian ini sudah dilakukan telaahan aspek biologi (terestrial dan akuatik) yang terkait dengan prakiraan dan evaluasi dampak terhadap entitas ekologis. Melalui penerapan RKL dan RPL, rencana kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis di wilayah studi.</p> <p>(Dalam upaya melestarikan habitat satwa liar, pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW hanya terbatas pada area yang dibangun sesuai izin).</p>
Rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	<p>Dalam kajian ini sudah dilakukan telaahan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan. Pemrakarsa berkomitmen bermitra dengan masyarakat di desa-desa sekitarnya untuk mengembangkan usaha yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan.</p>
Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud	<p>Dalam kajian ini sudah dilakukan telaahan rona lingkungan hidup awal yang melingkupi berbagai aspek (komponen geofisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya serta kesehatan masyarakat) yang seluruhnya dapat dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rencana kegiatan tidak akan melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam batas wilayah studi.</p>

ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Oleh PT Cirebon Energi Prasarana

BAB V
RENCANA
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP



PT CIREBON ENERGI PRASARANA

Wisma Pondok Indah Tower 3, Lt. 25

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V – TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan Telp : 021 2932 7990, Fax : 021 2932 7991

Email : amdal@cepr.co.id

5.0 RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

5.1 PERNYATAAN MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN ADENDUM RKL-RPL

PT Cirebon Energi Prasarana (CEPR) merupakan salah satu perusahaan swasta yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas produksi listrik sebesar 1x1.000 MW yang berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Blok Kandawaru, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Energi listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN dan disalurkan ke jaringan transmisi Jawa-Madura-Bali 500 kV melalui Gardu Induk di Mandirancan. PLTU yang akan dibangun merupakan pengembangan dari PLTU Cirebon unit 1 yang saat ini telah beroperasi dengan kapasitas 1x660 MW. Selain rencana pembangunan PLTU Cirebon kapasitas 1x1.000 MW, pemrakarsa juga bermaksud membangun dermaga (*jetty*) untuk bongkar muat batubara dengan bentuk konstruksi *trestle* sepanjang 1,67 mil laut (2.700 m).

Bab RKL ini merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh PT CEPR dalam menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak secara keseluruhan. Penyusunan Adendum ANDAL, RKL dan RPL ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, bab RKL dan RPL ini ditujukan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Secara spesifik, maksud dan tujuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan PLTU oleh PT CEPR;
2. Memelihara kualitas lingkungan hidup di lokasi PT CEPR dan sekitarnya melalui penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Sebagai arahan dan panduan dalam mengelola dan memantau dampak yang timbul terhadap komponen lingkungan hidup oleh rencana kegiatan PT CEPR;
4. Sebagai arahan dan panduan bagi instansi terkait dan masyarakat dalam membantu dan mengawasi penerapan RKL-RPL;
5. Mencegah, menanggulangi, meminimalisasi, serta mengendalikan dampak negatif yang timbul dan meningkatkan dampak positif yang muncul;

6. Memantau komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar yang terkena dampak penting dan/atau yang terkena dampak lingkungan hidup lainnya;
7. Memantau sumber-sumber penyebab dampak yang ada; dan
8. Menjadikan hasil pelaksanaan RKL-RPL sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan terhadap peraturan yang berlaku, menganalisis pola kecenderungan dan tingkat kritis dari kondisi lingkungan berdasarkan pengelolaan lingkungan yang diimplementasikan.

5.2 PERNYATAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Beberapa pernyataan kebijakan lingkungan yang akan diterapkan oleh PT. CEPR dalam kegiatan pembangunan unit PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon adalah sebagai berikut:

- PT CEPR merupakan perusahaan swasta di bidang infrastruktur dan energi berkomitmen mematuhi ketentuan peraturan perundangan terkait yang berlaku, serta menjadi mitra yang baik bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya;
- PT CEPR mempunyai komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan memantau dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta menerapkan opsi pengelolaan terbaik (*best available technology*);
- PT CEPR, berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menghargai, akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, ketentuan hukum yang berlaku, dan integrasi organisasi secara menyeluruh; dan
- PT CEPR mewujudkan komitmen dan prinsip tersebut melalui penetapan kebijakan operasional dan diantaranya dengan menetapkan kebijakan *Corporate Social Responsibility*.

5.3 RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun karena rencana kegiatan tersebut diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap komponen lingkungan hidup, sehingga akan mengalami perubahan yang mendasar, baik terhadap komponen lingkungan geofisik-kimia, biologi maupun komponen lingkungan sosial ekonomi dan budaya serta kesehatan masyarakat. Dampak yang diperkirakan timbul akan dikelola melalui pendekatan teknologi, sosial-ekonomi, dan kelembagaan (institusi).

Rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk rencana kegiatan yang menjadi lingkup dalam dokumen ini disajikan dalam bentuk matriks (Tabel 5.1), sedangkan peta lokasi pengelolaan disediakan dalam Gambar 5.1.

Tabel 5-1. Matriks Adendum Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Pembangunan Unit PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting Yang Dikelola							
A. TAHAP PRA KONSTRUKSI							
1.	Perubahan mata pencaharian	Pengadaan lahan	Terciptanya lapangan kerja dan/atau sumber nafkah baru bagi warga penyewa /penggarap lahan garam atau ikan, dan sawah yang kehilangan sumber mata pencahariannya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan sosialisasi terkait rencana pengadaan lahan secara transparan kepada para penggarap lahan milik KLHK yang akan digunakan untuk lokasi tapak proyek PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW. ▪ Melakukan pendataan secara rinci/detil terkait kepemilikan dan penguasaan lahan di areal lahan yang dibebaskan yang meliputi : 1) jumlah pemilik lahan yang akan terkena pembebasan, 2), Jumlah penggarap lahan (tambak garam, tambak ikan, dan sawah) di lahan KLHK seluas ± 195 ha, 3). Luas lahan milik dan lahan garapan yang dibebaskan. ▪ Melakukan musyawarah dengan para pemilik lahan yang dibebaskan terkait dengan nilai jual-beli lahan (terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan di tanah timbul yang dikuasai oleh warga sekitar). ▪ Membantu KLHK melakukan pendekatan dan musyawarah dengan para penggarap lahan terkait dengan besaran tali asih lahan garapan (tambak garam, tambak ikan dan sawah) yang dibebaskan. ▪ Pemrakarsa akan berupaya mencari dan menyediakan alternatif pemecahan masalah hilangnya mata pencaharian para penyewa dan/atau penggarap yang dibebaskan lahan garapannya, setidaknya terdapat beberapa alternatif upaya untuk memecahkan masalah tersebut yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam jangka pendek, pemrakarsa akan mengutamakan para penggarap lahan dan buruh tani yang kehilangan sumber mata pencaharian agar diterima menjadi tenaga kerja pada kegiatan konstruksi pembangunan PLTU selama ± 2 tahun, 2. Pemrakarsa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menciptakan peluang berusaha baru bagi para penggarap lahan (petambak garam, petambak ikan, dan petani sawah) yang terkena pembebasan lahan dengan memperhatikan potensi, minat dan peluang berusaha yang tersedia. 3. Upaya pengelolaan diprioritaskan kepada kelompok rentan yaitu kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1). Penggarap lahan di areal 195 Ha yang berusia lanjut (berusia di atas 54 tahun) yang kemungkinannya kecil untuk dapat direkrut atau bekerja pada kegiatan Tahap Konstruksi dan Tahap Operasi PLTU, 2). Penggarap lahan di areal 195 ha yang tidak memiliki mata pencaharian lain dan/atau yang sumber pendapatan rumah tangganya 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pengadaan lahan Tahap Pra Konstruksi dilakukan 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pengadaan lahan Tahap Pra Konstruksi dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pengadaan lahan Tahap Pra Konstruksi dilakukan Selama Tahap Pra Konstruksi Selama Tahap Pra Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: PT. CEPR ▪ Pengawas: Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon ▪ Penerima Laporan: Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dominan bergantung dari lahan garapan tersebut.			
				<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pengadaan lahan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembebasan lahan, 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pengadaan lahan Tahap Pra Konstruksi dilakukan	
2.	Perubahan pendapatan	Pengadaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terjadinya kehilangan atau penurunan tingkat pendapatan warga yang selama ini menggarap lahan di areal yang dibebaskan baik sebagai petambak garam, petambak ikan, dan petani sawah beserta dengan buruh tambak/tani. Setelah dilakukan kegiatan pembebasan lahan, tingkat pendapatan warga penggarap lahan minimal sama atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan sebelum dilakukannya pembebasan lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memberikan prioritas utama kepada para penggarap lahan yang kehilangan mata pencaharian dalam perekrutan tenaga kerja pada Tahap Konstruksi. Mengupayakan peluang usaha baru bagi para penggarap yang kehilangan mata pencaharian. Melakukan jalinan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal dalam pengupayaan peluang usaha baru untuk peningkatan pendapatan masyarakat. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Pra Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
3.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pengadaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya persepsi positif masyarakat (terutama para penggarap lahan) terhadap rencana pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan lahan. Terciptanya kondisi lingkungan sosial yang semakin harmonis dan kondusif. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan semua pengelolaan dampak hilangnya mata pencaharian dan penurunan pendapatan di atas dengan baik dan benar. Membangun wadah kelembagaan bersama (bisa berupa forum) yang terdiri atas pemrakarsa, para penggarap, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah (desa, kecamatan dan kabupaten) untuk mencari alternatif terbaik pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Mensosialisasikan atau mengkomunikasikan proses dan hasil kegiatan pengadaan lahan kepada <i>stakeholders</i> terkait (masyarakat yang terkena pembebasan lahan, aparat pemerintahan desa dan kecamatan). 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	<p>Selama Tahap Pra Konstruksi berlangsung</p> <p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pembebasan lahan dimulai</p> <p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pembebasan lahan dimulai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Sosial Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Sosial Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
4.	Peningkatan kesempatan kerja	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	Minimum 40% dari kebutuhan tenaga kerja konstruksi diprioritaskan dari tenaga kerja lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan mengutamakan warga lokal sesuai dengan kualifikasi dan ketersediaan lapangan kerja, melalui : <ul style="list-style-type: none"> Penerimaan tenaga kerja secara transparan dan memberikan kesempatan kerja dan prioritas utama kepada masyarakat di 5 desa studi, minimum sebesar 40% dari total tenaga kerja yang akan diserap pada Tahap Konstruksi. Memasang papan pengumuman secara terbuka di balai desa dan kantor kecamatan yang berkaitan dengan lowongan dan jenis pekerjaanyang dapat diisi masyarakat lokal. Pemrakarsa dan kontraktor akan berkoordinasi 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	<p>Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung</p> <p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan penerimaan tenaga kerja</p> <p>Selama kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan : DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>dan bekerja sama dengan lembaga "Komite Tenaga Kerja Lokal" yang telah dibangun sejak PLTU Cirebon kapasitas 1 x 660 MW dalam melakukan proses perekrutan tenaga kerja lokal, agar proses perekrutan tenaga kerja lokal benar-benar telah memperhatikan dan memprioritaskan pencari kerja yang berasal dari komunitas masyarakat, terutama yang berada dalam ring 1 di desa-desa yang termasuk dalam wilayah studi, dengan tingkat prioritas sebagai berikut :</p> <p>Prioritas utama : warga yang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak dari kegiatan pengadaan lahan, yaitu para penggarap lahan untuk kegiatan tambak garam, tambak ikan dan sawah di areal KLHK beserta dengan buruh-buruh yang terlibat dalam kegiatan tersebut,</p> <p>Prioritas kedua : warga pencari kerja (pengangguran) di 5 (lima) desa studi, terutama komunitas yang berbatasan langsung dengan tapak proyek dan diprediksi akan terkena dampak negatif langsung dari kegiatan konstruksi.</p> <p>Prioritas ketiga, pencari kerja yang berasal dari kecamatan sekitarnya di Kabupaten Cirebon.</p>		penerimaan tenaga kerja berlangsung	
5.	Persepsi dan sikap masyarakat	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya persepsi negatif dari masyarakat pencari kerja. Rendahnya intensitas keluhan dan protes masyarakat atas rencana pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat terkait jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pada Tahap Konstruksi. Pemrakarsa memberikan pelatihan keterampilan bagi para pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan oleh kegiatan konstruksi, seperti pelatihan keterampilan mengelas, menyambung pipa, memasang peralatan listrik, dan lainnya. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Pra Konstruksi dimulai.	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
B. TAHAP KONSTRUKSI							
1.	Penurunan kualitas udara ambien	Mobilisasi peralatan dan material	Kualitas udara ambien memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan kendaraan proyek yang laik jalan; Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi alat dan material terutama di permukiman maks. 20 km/jam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; Proses pengangkutan material (tanah gali/ urug) dilengkapi dengan penutup terpal pada saat melewati daerah permukiman; Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan); Melakukan perawatan mesin kendaraan secara berkala sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; 	<ul style="list-style-type: none"> Di sepanjang jalur akses mobilisasi alat dan material; Pintu keluar masuk ke lokasi tapak proyek; Di setiap truk; Di sepanjang jalur akses mobilisasi alat dan material; Di setiap truk; 	<ul style="list-style-type: none"> Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung pada Tahap Konstruksi Rambu lalu lintas dipasang sebelum dan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung pada Tahap Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyiraman minimal dua kali sehari menggunakan <i>water spraying truck</i> pada ruas jalan akses yang tidak diaspal yang dilalui kendaraan pengangkut peralatan dan material secara rutin, terutama pada saat musim kemarau dengan mengacu kepada prosedur penyiraman jalan. Membersihkan atau menghilangkan debu pada roda kendaraan dengan <i>wheel washing machine</i>; Mengikuti <i>Standard Operation Procedure</i> pencegahan pencemaran lingkungan hidup. 	<p>Sepanjang 600 m di jalan akses lokasi tapak proyek;</p> <p>Jalan akses masuk proyek dan di dalam lokasi tapak proyek</p> <p>Di sepanjang jalur akses mobilisasi alat dan material;</p>	<p>Minimal 2 kali sehari setiap pagi dan siang pada musim kemarau</p> <p><i>Wheel washing machine</i> dipasang sebelum dan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material</p> <p>Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung pada Tahap Konstruksi</p>	
2.	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi peralatan dan material	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu yang sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan kendaraan proyek yang laik jalan, termasuk penggunaan <i>exhaust muffler</i> (tabung knalpot). Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan); Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi alat dan material, terutama di permukiman maks. 20 km/jam; Perawatan mesin kendaraan secara berkala sesuai dengan prosedur baku dan ketentuan yang berlaku; 	Di sepanjang jalur akses mobilisasi alat dan material, terutama yang berdekatan dengan permukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru) dan Desa Astanamukti	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung pada Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
3.	Peningkatan peluang usaha	Mobilisasi peralatan dan material	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak.	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkenadampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru. Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
4.	Gangguan aktivitas nelayan pinggir, nelayan yang melaut, dan pembuat terasi	Mobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang berkaitan dengan rute lalu lintas kapal/perahu nelayan pergi-pulang melaut. Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang beroperasi pada jarak 0 – 1 mil laut dari garis pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kegiatan mobilisasi peralatan dan material kepada masyarakat nelayan dan terkait peta pelayaran di sekitar tapak proyek; Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas laut; Melakukan musyawarah secara mufakat (tanpa melalui perantara) terkait rumpon yang terdampak oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material supaya nelayan tetap dapat menjalankan aktifitas budidaya kerang hijau tanpa perlu melintas di area mobilisasi peralatan dan material. 	<p>Perkampungan nelayan di wilayah studi</p> <p>Jalur mobilisasi peralatan dan material di wilayah kegiatan</p> <p>Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</p>	<p>2 (satu) bulan sebelum kegiatan mobilisasi peralatan dan material</p> <p>2 (dua) minggu sebelum kegiatan mobilisasi peralatan dan material dimulai</p> <p>1 (satu) bulan sebelum kegiatan mobilisasi peralatan dan material dimulai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon, DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dan pemberdayaan nelayan pinggir laut pencari ikan, udang kecil (rebon), kerang dan pembuat terasi; 	Desa Kanci Kulon	Sebelum dan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	
5.	Perubahan pendapatan	Mobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW Tidak terjadinya penurunan pendapatan para nelayan yang operasi wilayah tangkapan ikannya berada di sekitar kegiatan mobilisasi peralatan melalui laut melalui dermaga sementara. 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK) Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
6.	Persepsi dan sikap masyarakat	Mobilisasi peralatan dan material	Tidak terdapat keluhan warga akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material akibat penurunan kualitas udara ambien, peningkatan kebisingan, gangguan nelayan melaut	Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan mobilisasi peralatan dan material yang telah tercantum pada butir 1, 2 dan 4.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
7.	Potensi Gangguan Penyakit/Kesehatan	Mobilisasi peralatan dan material	Tidak ada peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan (ISPA)	Melakukan pengelolaan sumber dampak primer yang terkait dengan penurunan kualitas udara ambien.	Rencana jalan akses di Blok Karangmulya Desa Kanci, Blok Kandawaru (Desa Waruduwur) dan Desa Astanamukti.	Bersamaan dengan dimulainya kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon dan Dinas Kesehatan Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar dan Dinas Kesehatan Kab. Cirebon
8.	Peningkatan lalu lintas darat (gangguan lalu lintas)	Mobilisasi peralatan dan material	Tidak terjadi kemacetan pada ruas jalan pantura terutama di titik pertemuan dengan jalan akses.	<ul style="list-style-type: none"> Mengatur keluar masuk kendaraan di titik pertemuan ruas jalan pantura dengan jalan akses masuk proyek Menempatkan petugas pengatur lalu lintas di titik keluar-masuknya kendaraan proyek ke jalan pantura. 	<ul style="list-style-type: none"> Titik pertemuan ruas jalan Pantura dengan jalan akses Jalan akses menuju tapak proyek 	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Perhubungan Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Perhubungan Kab. Cirebon, DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
9.	Peningkatan erosi dan sedimentasi	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Konsentrasi TSS dalam air sungai tidak melampaui kondisi rona awal.	<ul style="list-style-type: none"> Menutup permukaan tanah dengan terpal atau bahan lainnya pada lahan yang sedang dilakukan pematangan (pengurugan, pemadatan dan perkerasan tanah). Memadatkan tanah urugan untuk mencegah terjadinya erosi gully dan longsor. Pemasangan <i>sediment trap</i> pada saluran drainase dan <i>outlet</i> kolam penampung sedimen (<i>settling pond</i>) yang dilengkapi filter Pemeliharaan <i>settling pond</i> 	Tapak proyek	<ul style="list-style-type: none"> Selama kegiatan pematangan lahan Sebelum kegiatan konstruksi dimulai Selama kegiatan pematangan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas PSDAP dan DLH Kab Cirebon. Penerima Laporan: Dinas PSDAP, DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
10.	Peningkatan debit air larian/limpasan	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Koefisien regim sungai <50 (Permenhut No. 61 tahun 2014 Tentang Monitoring dan Evaluasi	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja dilakukan secara bertahap dan terbatas hanya pada tapak proyek.	Tapak proyek : lokasi pematangan lahan	Bersamaan dengan dimulainya kegiatan pematangan lahan	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon. Penerima Laporan: DLH Kab.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)	<ul style="list-style-type: none"> Membuat saluran drainase sekeliling batas luar tapak proyek dengan dimensi yang mampu menampung limpasan permukaan pada periode puncak hujan Membangun <i>settling pond</i> dengan dimensi yang mampu menampung volume limpasan permukaan pada periode puncak hujan. Melakukan pemeliharaan saluran drainase dan <i>settling pond</i>. 		Sebelum kegiatan konstruksi dimulai Sebelum kegiatan konstruksi dimulai Selama kegiatan konstruksi	Cirebon dan DLH Prov. Jabar
11.	Perubahan komunitas flora darat (berkurangnya jumlah dan jenis flora darat)	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<ul style="list-style-type: none"> Luas tutupan lahan mangrove yang dibuka $\leq 1,64$ Ha Jumlah dan jenis flora darat, setara dengan kondisi awal atau lebih baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembukaan lahan sesuai dengan kebutuhan ($\leq 1,64$ Ha) Menanami dan memelihara jenis vegetasi pantai/mangrove Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 10% dari luas dari area PLTU (Permen PU No 41/PRT/M/2007). 	Lokasi pematangan lahan Minimal di sepanjang pantai yang termasuk lahan PLTU Di dalam area pembangunan PLTU	Sejak kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja dimulai Sejak Tahap Konstruksi dimulai Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon, DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
12.	Perubahan komunitas fauna darat (berkurangnya jumlah dan jenis fauna darat)	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Jumlah dan jenis fauna darat setara dengan kondisi awal/ lebih baik.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembukaan lahan sesuai dengan kebutuhan ($\leq 1,64$ Ha) Menanami dan memelihara jenis vegetasi pantai/mangrove Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 10% dari luas dari area PLTU (Permen PU No 41/PRT/M/2007) 	Lokasi pematangan lahan Minimal di sepanjang pantai yang termasuk lahan PLTU Di dalam area pembangunan PLTU	Pada saat pematangan lahan dilakukan Sejak Tahap Konstruksi dimulai Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan : DLH Kab. Cirebon
13.	Peningkatan peluang usaha	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak, terutama bagi penggarap lahan yang kehilangan sumber mata pencaharian.	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru. Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
14.	Perubahan pendapatan	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Terdapat peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK) Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
15.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Tidak terdapat keluhan warga akibat pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja (peningkatan erosi dan sedimentasi dan perubahan komunitas flora darat) Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung Sebelum kegiatan konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pematangan lahan dan penyiapan areal kerja melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan.	Desa Pengarengan		
16.	Peningkatan kebisingan	Pembangunan jalan akses	Tingkat kebisingan tidak melebihi baku mutu (Kep. Men-LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan)	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan kendaraan yang laik jalan Mengatur kecepatan kendaraan proyek maks. 20 km/jam Melakukan kegiatan pada siang hari 	Jalur pembangunan jalan akses	Selama kegiatan pembangunan jalan akses berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas PU Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
17.	Peningkatan peluang usaha	Pembangunan jalan akses	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak.	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkenadampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru. Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
18.	Perubahan pendapatan	Pembangunan jalan akses	Terdapat peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK) Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
19.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pembangunan jalan akses	Tidak terdapat keluhan warga akibat pembangunan jalan akses	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan jalan akses (peningkatan kebisingan). Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari pembangunan jalan akses melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung Sebelum kegiatan konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.
20.	Peningkatan peluang usaha	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru. Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
21.	Perubahan pendapatan	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Terdapat peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK) Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi.			
22.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Tidak terdapat keluhan warga akibat pembangunan PLTU dan fasilitasnya	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan PLTU dan fasilitasnya (peningkatan peluang usaha). Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari pembangunan jalan akses melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
23.	Peningkatan peluang usaha	Pembangunan dermaga	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru. Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
24.	Gangguan aktivitas nelayan pinggiran, nelayan yang melaut, dan pembuat terasi	Pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang berkaitan dengan rute lalu lintas kapal/perahu nelayan pergi-pulang melaut. Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang beroperasi pada jarak 0 – 1 mil laut dari garis pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kegiatan pembangunan dermaga kepada masyarakat nelayan dan terkait peta pelayaran di sekitar tapak proyek; 	<ul style="list-style-type: none"> Perkampungan nelayan di wilayah studi 	2 (satu) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon, DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
				<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas laut; 	<ul style="list-style-type: none"> Area pembangunan dermaga di wilayah kegiatan 	2 (dua) minggu sebelum kegiatan pembangunan dermaga dimulai	
				<ul style="list-style-type: none"> Melakukan musyawarah secara mufakat (tanpa melalui perantara) terkait rumpon yang terdampak oleh kegiatan pembangunan dermaga supaya nelayan tetap dapat menjalankan aktifitas budidaya kerang hijau tanpa perlu melintas di area pembangunan dermaga. 	<ul style="list-style-type: none"> Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. 	1 (satu) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga dimulai	
				<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dan pemberdayaan nelayan pinggiran laut pencari ikan, udang kecil (rebon), kerang dan pembuat terasi; 	<ul style="list-style-type: none"> Perkampungan nelayan di wilayah studi 	Sebelum dan selama kegiatan pembangunan dermaga	
25.	Gangguan aktivitas budidaya kerang	Pembangunan dermaga (permanen)	Tidak terdapat keluhan dari nelayan budidaya kerang.	1) Melakukan sosialisasi kepada nelayan budidaya kerang hijau terkait rumpon yang terkena dampak pembangunan dermaga permanen,	Perkampungan nelayan di wilayah studi	2 (dua) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon serta DLH Provinsi Jawa Barat.
				2) Melakukan koordinasi dengan pemerintah (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon) terkait budidaya Tengyong (Kerang Hijau) di wilayah sekitar proyek sesuai dengan peraturan berlaku.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama pembangunan dermaga	
26.	Perubahan pendapatan	Pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW Tidak terjadinya penurunan pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK) Memberikan peluang berusaha kepadamasyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon.

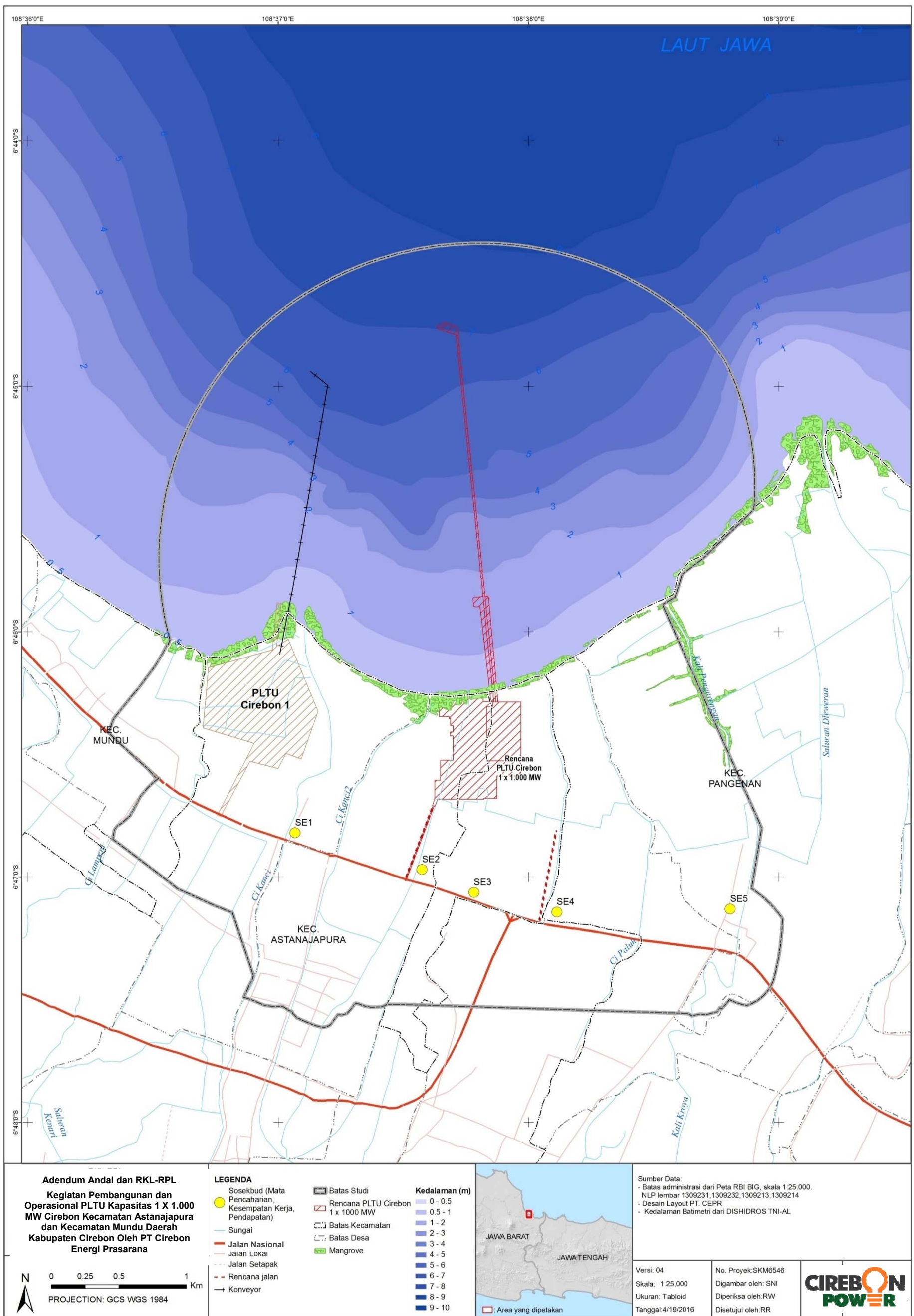
No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			para nelayan.	tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan catering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi.			
27.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pembangunan dermaga	Tidak terdapat keluhan warga akibat pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan dermaga (peningkatan peluang usaha, gangguan aktivitas nelayan melaut, dan gangguan aktivitas budidaya kerang) Memberikan sosialisasi tentang mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat nelayan yang berkaitan dengan pembangunan dermaga. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	<p>Selama Tahap Konstruksi berlangsung</p> <p>2 (dua) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon
28.	Perubahan pendapatan	Pelepasan tenaga kerja Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terjadinya penurunan signifikan pendapatan rumah tangga para tenaga kerja lokal yang terkena PHK. Tidak adanya keluhan dari tenaga kerja yang terkena PHK. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan pelepasan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan informasi tentang rencana pelepasan tenaga kerja minimal 6 bulan sebelumnya agar para pekerja dapat mempersiapkan diri untuk mencari alternatif mata pencaharian lain. Mengupayakan terciptanya peluang usaha baru melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, misalnya Dinas Tenaga Kerja. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat kerjasama dengan Pemerintah Daerah. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Pada akhir masa kerja pada tahap Konstruksi.	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan DLH Kabupaten Cirebon.
29.	Peningkatan keterampilan	Pelepasan tenaga kerja Tahap Konstruksi	Terjadinya peningkatan keterampilan/keahlian tenaga kerja lokal setelah pelepasan tenaga kerja.	Mengupayakan kegiatan pelatihan keterampilan kepada tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan minat/kebutuhan, bakat dan potensi tenaga kerja lokal serta potensiusaha yang dapat dikembangkan di sekitar lokasi kegiatan.	PT. CEPR., khususnya bidang yang menangani pengembangan sumberdaya manusia perusahaan.	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja dan DLH Kabupaten Cirebon.
30.	Peningkatan kesempatan kerja	Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi	Minimum 40% dari kebutuhan tenaga kerja konstruksi diprioritaskan dari tenaga kerja lokal.	<p>Penerimaan tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan mengutamakan warga lokal sesuai dengan kualifikasi dan ketersediaan lapangan kerja, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerimaan tenaga kerja secara transparan dan memberikan kesempatan kerja dan prioritas utama kepada masyarakat di 5 desa studi, minimum sebesar 40% dari total tenaga kerja yang akan diserap pada Tahap Konstruksi. Memasang papan pengumuman secara terbuka di balai desa dan kantor kecamatan yang berkaitan dengan lowongan dan jenis pekerjaan yang dapat diisi masyarakat lokal. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	<p>Selama Tahap Konstruksi dan Operasi</p> <p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon, DLH Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon
31.	Persepsi dan sikap masyarakat	Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi	Tidak terdapat keluhan warga dan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan upaya pengelolaan dampak primer sesuai dengan yang direncanakan (peningkatan kesempatan kerja). Melakukan sosialisasi terkait rencana perekrutan tenaga kerja, terutama mengenai keterbatasan jumlah tenaga kerja yang dapat direkrut pada Tahap Operasi. Perekrutan tenaga kerja untuk Tahap Operasi dengan mengutamakan tenaga kerja lokal yang telah direkrut pada Tahap Konstruksi 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	<p>Selama penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi</p> <p>2 (dua) bulan sebelum kegiatan penerimaan tenaga kerja Tahap Operasi</p> <p>Selama penerimaan tenaga kerja Tahap</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
C. TAHAP OPERASI							
1.	Gangguan aktivitas nelayan melaut	Operasional dermaga (bongkar muat batubara)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang berkaitan dengan rute lalu lintas kapal/perahu nelayan pergi-pulang melaut. Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang beroperasi pada jarak 0 – 1 mil laut dari garis pantai. 	<p>Sosialisasi kegiatan operasional dermaga kepada masyarakat nelayan dan terkait peta pelayaran di sekitar tapak proyek;</p> <p>Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas laut;</p> <p>Melakukan musyawarah secara mufakat (tanpa melalui perantara) terkait rumpon yang terdampak oleh kegiatan operasional dermaga supaya nelayan tetap dapat menjalankan aktifitas budidaya kerang hijau tanpa perlu melintas di area operasional dermaga.</p> <p>Melakukan pembinaan dan pemberdayaan nelayan pinggiran laut pencari ikan, udang kecil (rebon) dan kerang.</p>	<p>Perkampungan nelayan di wilayah studi</p> <p>Area operasional dermaga</p> <p>Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</p>	<p>2 (dua) bulan sebelum kegiatan operasional dermaga</p> <p>2 (dua) minggu sebelum kegiatan operasional dermaga dimulai</p> <p>1 (satu) bulan sebelum kegiatan operasional dermaga dimulai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon
2.	Persepsi dan sikap masyarakat	Operasional dermaga (bongkar muat batubara)	Tidak terdapat keluhan dari nelayan di wilayah studi.	Melakukan upaya dan rencana pengelolaan dampak primer kegiatan operasional dermaga (gangguan aktivitas nelayan melaut)	<ul style="list-style-type: none"> Komunitas nelayan di Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. Lokasi perairan laut di sekitar operasional dermaga (<i>dermaga</i>) bongkar muat batubara. 	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon
3.	Penurunan kualitas udara ambien	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Kualitas udara ambien: TSP : 230 µg/Nm ³ /24 jam PM10 : 150 µg/Nm ³ /24 jam sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	Kegiatan penanganan batubara di <i>stockyard</i> : <ul style="list-style-type: none"> Memasang penutup pada jalur conveyor; Memasang pagar pemecah angin (<i>wind breaker fence</i>) mengelilingi <i>stockyard</i> Memastikan instalasi sistem penyemprotan air (<i>water spray</i>) bekerja dengan baik dan optimal. Menanam pohon jenis lokal sebagai <i>green belt</i> di sekeliling <i>stockyard</i> 	Area sekitar <i>stockyard</i>	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
4.	Persepsi dan sikap masyarakat	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Tidak terdapat keluhan warga akibat penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Melaksanakan seluruh rencana pengelolaan bagi dampak penurunan kualitas udara ambien dan gangguan kesehatan yang memberikan dampak turunan terhadap persepsi dan sikap masyarakat.	Lokasi pemukiman penduduk yang berdekatan dengan lokasi penyimpanan batubara di <i>stockyard</i> sesuai dengan hasil perkiraan sebaran dampak penurunan kualitas udara ambien.	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon
5.	Gangguan Penyakit	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Tidak ada peningkatan kasus gangguan sistem pernafasan (ISPA)	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas udara Melakukan program pelayanan kesehatan (promosi kesehatan: penyuluhan kesehatan) 	<p>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa</p>	<p>Selama Tahap Operasi berlangsung</p> <p>Setiap 6 (enam) bulan sekali</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinkes & DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon & DLH Prov. Jabar

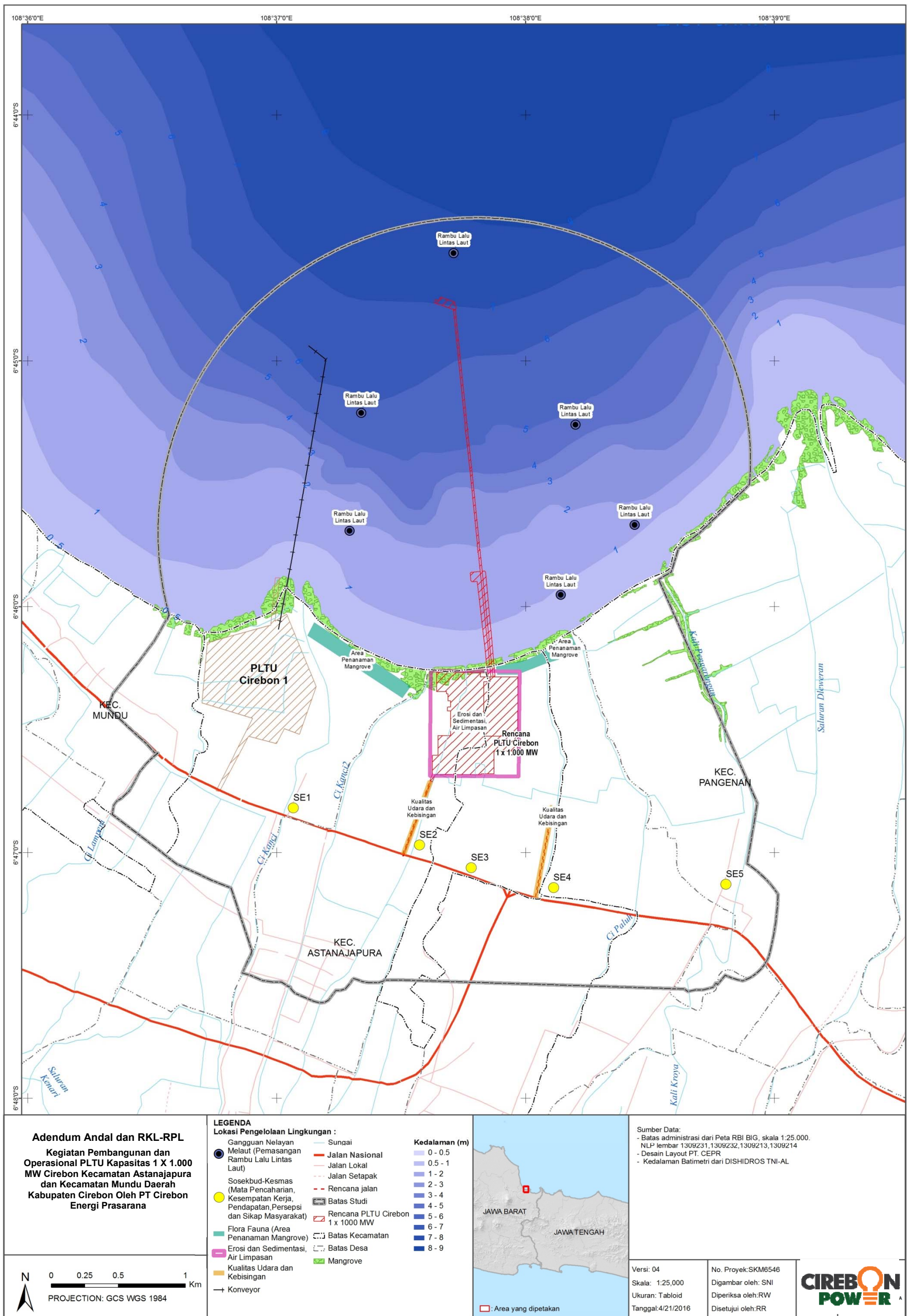
No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				tentang Pola Hidup Bersih Sehat/PHBS, pemeriksaan dan pengobatan kesehatan) kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan setempat.	Astanamukti, dan Desa Pengarengan		
6.	Penurunan kualitas udara ambien	Operasional unit PLTU	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas udara ambien: TSP : 230 µg/Nm³/24 jam PM10 : 150 µg/Nm³/24 jam PM2,5 : 65 µg/Nm³/24 jam NO₂ : 400 µg/Nm³/1 jam SO₂ : 365 µg/Nm³/24 jam CO : 30.000 µg/Nm³/1 jam Debu jatuh : 10 ton/km²/bulan sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Emisi Sulfur dioksida (SO₂), Nitrogen dioksida (NO₂), Total Partikulat), dan Opasitas (Lampiran 1A) tidak melebihi baku mutu (PerMenLH No 21 Tahun 2008) 	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan cerobong (<i>chimney</i>) dibangun dengan ketinggian 200 meter dan menggunakan batubara dengan kandungan rendah sulfur (rata-rata 0,37%) Memastikan peralatan kendali pencemar udara beroperasi dengan baik dan optimal (<i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP) dan <i>Flue Gas Desulphurixation</i> (FGD)) 	Powerblock (<i>steam generator boiler</i>) unit PLTU	<p>Dilakukan sejak awal Tahap Konstruksi</p> <p>Selama Tahap Operasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon & DLH Prov. Jabar
7.	Peningkatan kebisingan	Operasional unit PLTU	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Menempatkan alat-alat mekanikal sumber bising di dalam ruangan tertutup yang dilengkapi peredam suara. Menanam pohon di sekeliling area PLTU sebagai <i>green barrier</i>. 	Area power block PLTU	Dilakukan sejak awal Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar
8.	Penurunan kualitas air laut	Operasional unit PLTU	<ul style="list-style-type: none"> Air laut memenuhi baku mutu KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004 Baku mutu efluent limbah cair sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 Lampiran I 	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola limbah cair Memasang <i>flow meter</i> Membangun dinding pencegah longsor batubara agar tidak ada batubara yang masuk ke saluran air larian batubara Memisahkan saluran air larian batubara dengan saluran air hujan Pada saat pembangunan <i>stockyard</i> dilengkapi dengan membuat kolam penampungan (<i>pit</i>) untuk menampung air yang terkontaminasi batubara Membuat <i>small bund</i> (penahan air yang terkontaminasi batubara) yang jatuh ke laut 	<p>di WWTP</p> <p>di setiap titik penataan untuk mengukur debit air</p> <p>Di sekeliling <i>stockyard</i></p> <p>Di sekeliling <i>stockyard</i></p> <p>Di <i>stockyard</i></p> <p>sepanjang jetty dan dermaga</p>	Sejak Tahap Operasional dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon
9.	Perubahan komunitas biota laut	Operasional unit PLTU	Struktur komunitas biota air laut (bentos dan nekton) setara dengan kondisi awal	Mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas air laut	Area PLTU	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
10.	Peningkatan peluang usaha	Operasional unit PLTU	Adanya masyarakat setempat yang memanfaatkan kesempatan kerja dan peluang berusahaketika kegiatan operasional PLTUCirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru. Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada tahap operasi . 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon
11.	Perubahan pendapatan	Operasional unit PLTU	Terdapat peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK) Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon
12.	Persepsi dan sikap masyarakat	Operasional unit PLTU	Tidak terdapat keluhan warga akibat operasional unit PLTU	<p>Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan operasional unit PLTU (penurunan kualitas udara ambien, kebisingan, penurunan kualitas air laut, dan peningkatan peluang usaha)</p> <p>Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari operasional unit PLTU melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan.</p>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung Sebelum kegiatan Operasional unit PLTU dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon
13.	Gangguan Penyakit	Operasional unit PLTU	Tidak ada peningkatan kasus gangguan sistem pernafasan (ISPA)	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas udara Melakukan program pelayanan kesehatan (promosi kesehatan: penyuluhan kesehatan tentang Pola Hidup Bersih Sehat/PHBS, pemeriksaan dan pengobatan kesehatan) kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan setempat. 	Area PLTU Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Operasi berlangsung Setiap 6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinkes Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon & DLH Prov. Jabar
14.	Persepsi dan sikap masyarakat	Penyimpanan sementara abu batubara	Tidak terdapat keluhan warga akibat penyimpanan sementara abu batubara	Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan operasional unit PLTU (penurunan kualitas udara ambien)	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Operasi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon
15.	Gangguan penyakit	Penyimpanan sementara abu batubara	Tidak ada peningkatan kasus gangguan sistem pernafasan (ISPA)	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola sumber dampak primer yang terkait dengan komponen kualitas udara Melakukan program pelayanan kesehatan (promosi kesehatan: penyuluhan kesehatan tentang Pola Hidup Bersih Sehat/PHBS, pemeriksaan dan pengobatan kesehatan) kepada masyarakat bekerjasama dengan instansi pelayanan kesehatan setempat. 	Area PLTU Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Operasi berlangsung Setiap 6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon dan Dinas Kesehatan Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
D. Dampak Lingkungan Lainnya Yang Dikelola							
1.	Penurunan kualitas air permukaan	Pengecatan, sisa bahan kimia dan bahan lainnya yang digunakan pada saat pembangunan PLTU dan fasilitasnya, khususnya <i>batching plant</i>	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu sesuai aturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Membuat pengolahan air limbah untuk setiap fasilitas yang menghasilkan air limbah selama Tahap Konstruksi, seperti: <ul style="list-style-type: none"> Untuk <i>batching plant</i> dengan membangun <i>settling pond</i> dan filterisasi. Untuk sisa pengecatan dan bahan kimia lain dibuatkan tempat penyimpanan sementara yang kedap air. Untuk sumber limbah lain akan dibuatkan instalansi air limbah yang disesuaikan dengan fungsinya. 	Tapak Proyek	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon & BPLHD Prov Jabar
2.	Penurunan kualitas air tanah	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas air tanah di lokasi pemukiman (sumur penduduk) memenuhi Baku Mutu sesuai dengan PerMenKes No. 416 Tahun 1990 Kualitas air sumur pantau memenuhi kondisi alami 	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan kolam penampung (<i>coal runoff pond</i>) bekerja dengan baik dan optimal Membuat sumur pantau (<i>monitoring well</i>) Menggunakan lapisan <i>gravel base coarse, sand, lapisan impermeable geotextile berupa non woven fabric dan HDPE High Dencity Polyethylene</i> pada tempat penimbunan batubara. 	Tempat penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Saat awal Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon & DLH Prov Jabar
3.	Penurunan sanitasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja Pembangunan jalan akses Pembangunan PLTU dan fasilitasnya Operasional unit PLTU 	Sanitasi lingkungan di sekitar tapak proyek baik	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan tempat penampungan limbah padat kegiatan konstruksi Membangun <i>Sewage Treatment Plant (STP)</i> untuk Tahap Konstruksi Membangun <i>Sewage Treatment Plant (STP)</i> untuk Tahap Operasi Menyediakan tempat penampungan sampah non B3 untuk Tahap Konstruksi Menyediakan tempat penampungan sampah non B3 untuk Tahap Operasi Menyediakan fasilitas MCK yang memadai Melakukan himbauan kepada pekerja konstruksi untuk berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS). 	Tapak proyek	Saat awal Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
4.	Limbah B3	Kegiatan konstruksi & Operasi PLTU	Tidak ada pencemaran limbah B3 ke lingkungan sekitar.	<ul style="list-style-type: none"> Mengacu pada Peraturan pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan CEPR bekerjasama dengan kontraktor yang memiliki izin dan pengelolaan limbah B3; Membangun gedung untuk tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 selama kegiatan konstruksi PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW Membangun gedung untuk tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 selain fly ash, bottom ash dan gipsum selama kegiatan operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW. Membangun Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 untuk <i>Fly Ash, Bottom Ash</i> dan Gipsum baik berupa bangunan kolam atau bangunan gedung atau berupa bangunan Silo/Bunker/Hopper atau dalam bentuk bangunan lainnya sesuai peraturan yang berlaku, dimana limbah <i>Fly Ash, Bottom Ash</i> dan Gipsum dihasilkan selama kegiatan operasi PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW 	Tapak proyek	Selama Tahap Konstruksi & Operasi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar

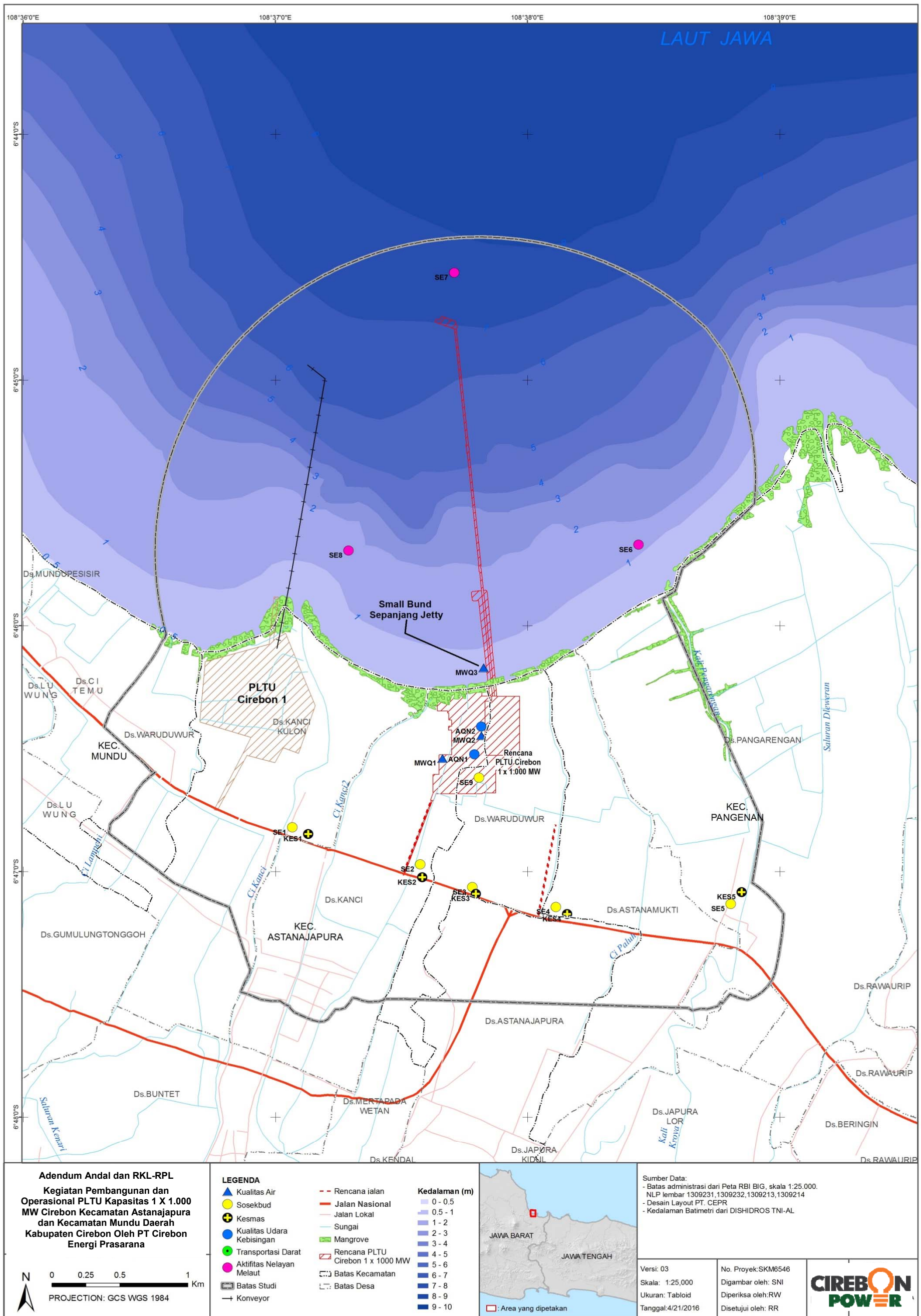


Gambar 5-1 Peta lokasi pengelolaan pada Tahap Pra Konstruksi.



G:\Project\Active_Projects\SKM\Layout\MXD\IRKL_RPL\IRKL_Konstruksi_v2.mxd

Gambar 5-2 Peta lokasi pengelolaan pada Tahap Konstruksi.



Gambar 5-3 Peta lokasi pengelolaan pada Tahap Operasi

ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Oleh PT Cirebon Energi Prasarana

BAB VI

RENCANA

PEMANTAUAN

LINGKUNGAN HIDUP



PT CIREBON ENERGI PRASARANA

Wisma Pondok Indah Tower 3, Lt. 25

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V – TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan Telp : 021 2932 7990, Fax : 021 2932 7991

Email : amdal@cepr.co.id

6.0 RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan hasil telaah terhadap dampak penting yang dilingkup dalam dokumen pada Bab 1, maka semua dampak yang dikelola harus dipantau agar upaya pengelolaan lingkungan menjadi lebih efisien dan efektif. Pemantauan lingkungan dilakukan sesuai dengan tahap kegiatan yang dilakukan, baik Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi dan Tahap Operasi. Tabel 6.1. menunjukkan rencana pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh PT CEPR untuk setiap tahap kegiatan. Peta lokasi pemantauan Tahap Pra Konstruksi, Tahap Konstruksi, dan Tahap Operasi dapat dilihat pada Gambar 6-1.

Tabel 6-1 Matriks Adendum Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Pembangunan Unit PLTU Kapasitas 1x1.000 MW Cirebon.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Penting Yang Dipantau									
A. TAHAP PRA KONSTRUKSI									
1.	Perubahan mata pencaharian	<p>Jumlah penggarap yang kehilangan mata pencaharian atau yang beralih mata pencaharian, meliputi penggarap lahan/petambak garam, petambak ikan, petani padi sawah, serta buruh yang bekerja pada masing-masing kegiatan garapan tersebut.</p> <p>jumlah dan jenis kegiatan sosialiasi yang dilakukan oleh pemrakarsa kepada para penggarap lahan</p>	Pengadaan lahan	<p>Metode Pengumpulan Data : Sensus terhadap semua penggarap lahan di wilayah studi</p> <p>Studi dokumentasi, berupa foto kegiatan sosialiasi</p> <p>Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif</p>	<p>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</p> <p>Kantor PT. CEPR</p>	Frekuensi Pemantauan 1 kali selama kegiatan pengadaan lahan	PT. CEPR	Kantor Pertanahan Kab. Cirebon	Kantor Pertanahan Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
2.	Perubahan pendapatan	Tingkat pendapatan para penggarap lahan	Pengadaan lahan	<p>Metode Pengumpulan Data : Wawancara mendalam (studi kasus) terhadap para penggarap dan buruh. Sampling dengan menggunakan kuisionerterstruktur tentang pendapatan rumah tangga penggarap lahan (petambakgaram, petambak ikan, petani sawah) dan para buruh yang menggantungkan mata pencahariannya di areal seluas ±195 ha.</p> <p>Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif</p>	Pemukiman penduduk dimana para penggarap dan buruh tani menetap di Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	Frekuensi Pemantauan 1 kali selama kegiatan pengadaan lahan	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
3.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif. Jumlah keluhan terkait kegiatan pengadaan lahan. 	Pengadaan lahan	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Studi dokumentasi foto survei dan wawancara Survei terhadap masyarakat terkena dampak menggunakan kuisioner dan wawancara mendalam. <p>Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. Kantor PT. CEPR. (Bidang CSR). 	Frekuensi Pemantauan 1 kali selama kegiatan pengadaan lahan	PT. CEPR	Dinas Sosial Kab. Cirebon	DLHDLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
4.	Peningkatan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah dan kriteria tenaga kerja lokal yang direkrut Tersedianya media pengumuman di balai desa di 5 desa studi. Proporsi tenaga kerja lokal terhadap total tenaga kerja konstruksi minimal sebesar 40%. Memastikan bahwa pemrakarsa dan kontraktor telah bekerjasama dengan Komite Tenaga Kerja 	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wawancara secara mendalam dengan wakil masyarakat dalam Komite tenaga kerja lokal yang dibentuk. Studi dokumentasi meliputi tenaga kerja yang direkrut dari HRD PT. CEPR dan fotopengumuman rerkrutment <p>Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. Kantor PT. CEPR (bidang HRD) 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Lokal dalam proses perekrutan tenaga kerja konstruksi.							
5.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif. Jumlah keluhan terkait kegiatan penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi 	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Studi dokumentasi foto survei dan wawancara Survei terhadap masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. <p>Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. Kantor PT. CEPR. (Bidang CSR). 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
B. TAHAP KONSTRUKSI									
1.	Penurunan kualitas udara ambien	Parameter TSP, PM ₁₀ , NO ₂ , SO ₂ dan CO	Mobilisasi peralatan dan material	<p>Metode Pengumpulan Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel TSP mengacu pada SNI-19-7119.3-2005; Pengambilan sampel PM₁₀ mengacu pada USEPA IO-2.1; Pengambilan sampel SO₂ mengacu pada SNI-19.7119.7-2005; Pengambilan sampel NO₂ mengacu pada SNI-19-7119.2-2005; Pengambilan sampel CO mengacu pada SNI 7119.10:2011; Pengamatan langsung dan dokumentasi untuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pembersihan terhadap ban truk yang keluar dari tapak proyek Perawatan rutin kendaraan proyek Kegiatan penyiraman jalan <p>Metode Analisis Data : Analisis laboratorium yang terakreditasi KAN dan dilakukan berdasarkan pada pedoman "SNI" dan membandingkan dengan baku mutu yang ditetapkan.</p>	Jalur mobilisasi peralatan dan material yang terdekat dengan pemukiman, yaitu <ul style="list-style-type: none"> Pada koordinat 108° 37' 31.646" BT; 6° 46' 58.051" LS Pada koordinat 108° 38' 3.948"BT; 6° 47' 8.242"LS Pada koordinat 108° 37' 49.134" BT; 6° 46' 34.357"LS 	3(Tiga) bulan sekali selama mobilisasi peralatan dan material	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon; DLH Provinsi Jawa Barat
2.	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan (dBA)	Mobilisasi peralatan dan material	<p>Metode Pengumpulan Data : Data kebisingan diukur dengan menggunakan <i>soundlevel meter</i> dan dihitung Ls, Lm dan Lsm sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.</p> <p>Metode Analisis Data : Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan peruntukkan pemukiman, yaitu 55+3 dB(A).</p>	Jalur mobilisasi peralatan dan material yang terdekat dengan pemukiman di wilayah studi, yaitu <ul style="list-style-type: none"> Pada koordinat 108° 37' 31.646" BT; 6° 46' 58.051" LS Pada koordinat 108° 38' 3.948"BT; 6° 47' 8.242"LS Pada koordinat 108° 37' 49.134" BT; 6° 46' 34.357"LS 	3 (tiga) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon; DLH Provinsi Jawa Barat
3.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan dengan 	Mobilisasi peralatan dan material	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Survei dengan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan 	Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon. DLH

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		perusahaan		lembaga ekonomi lokal Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif					Provinsi Jawa Barat
4.	Gangguan aktivitas nelayan pinggiran dan nelayan yang melaut	Keluhan dari nelayan terkait kegiatan mobilisasi peralatan dan material	Mobilisasi peralatan dan material	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Survei dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi foto aktivitas nelayan melaut di jalur mobilisasi peralatan dan material dan jumlah keluhan yang masuk ke PLTU Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Perkampungan nelayan di wilayah studi Jalur mobilisasi peralatan dan material di wilayah kegiatan Kantor PT. CEPR (bagian CSR) 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
5.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja. Tingkat pendapatan nelayan 	Mobilisasi peralatan dan material	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan nelayan. Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
6.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif. 	Mobilisasi peralatan dan material	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. 	<ul style="list-style-type: none"> Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan Kantor PT. CEPR (bagian CSR) 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan terkait kegiatan mobilisasi peralatan dan material 		Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif.					
7.	Gangguan Penyakit (gangguan kesehatan)	Jumlah kasus gangguan saluran nafas (khususnya ISPA)	Mobilisasi peralatan dan material	Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data bulanan kasus penyakit dari Puskesmas; Wawancara dengan masyarakat mengenai keluhan pada saluran pernafasan (ISPA); Pengamatan terhadap sanitasi lingkungan Metode Analisis Data : Deskripsi dengan melihat <i>incident rate</i> kasus penyakit saluran pernafasan.	Puskesmas setempat permukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru) dan Desa Astanamukti	3 bulan sekali setelah dimulainya kegiatan mobilisasi peralatan dan material	PT. CEPR	Dinkes Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon, DLH Prov. Jawa Barat dan Dinkes Kab. Cirebon
8.	Peningkatan lalu lintas darat (gangguan lalu lintas darat)	Tidak terjadi kemacetan pada ruas jalan pantura terutama di titik pertemuan dengan jalan akses.	Mobilisasi peralatan dan material	Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> Observasi secara langsung Studi dokumentasi meliputi foto kondisi lalu lintas di titik pertemuan dengan jalan akses, keberadaan rambu-rambu lalu lintas di titik keluar masuknya kendaraan proyek Metode Analisis Data :	<ul style="list-style-type: none"> Titik pertemuan ruas jalan Pantura dengan jalan akses Jalan akses menuju tapak proyek 	Hari libur dan hari kerja dengan frekuensi 3 kali selama masa mobilisasi peralatan dan material berlangsung	PT. CEPR	Dishub Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon, Dishub Kab. Cirebon & BPLHD Prov. Jabar

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<ul style="list-style-type: none"> V/C ratio mengacu kepada MKJI (1997). 					
9.	Peningkatan erosi dan sedimentasi	Konsentrasi TSS dalam air sungai	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel air sebanyak 1 sampel di setiap outlet Pengambilan sampel air di badan air penerima dengan ketentuan sebagai berikut: - apabila ke sungai sebanyak 2 titik, yaitu sebelum dan sesudah pertemuan dengan badan air - apabila ke laut sebanyak 1 titik. Metode Analisis Data : Analisis laboratorium sampel air untuk parameter TSS.	<ul style="list-style-type: none"> Outlet settling pond dan Badan air penerima 	Dilakukan 3 bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
10.	Peningkatan debit air larian/limpasan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada pematangan lahan diluar tapak proyek Adanya saluran drainase di sekeliling luar tapak proyek Kedalaman air pada settling pond 	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> Observasi lapangan terhadap kegiatan pematangan lahan dan penyiapan area kerja Mengukur kedalaman air pada settling pond Metode Analisis Data : Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi pematangan lahan settling pond 	3 (tiga) bulan sekali selama pematangan lahan dan penyiapan areal kerja. 1 (satu) bulan sekali selama pematangan lahan dan penyiapan areal kerja.	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan BPLHD Prov. Jabar
11.	Perubahan komunitas flora darat (berkurangnya jumlah dan jenis flora darat)	<ul style="list-style-type: none"> Tutupan dan ketebalan mangrove di area proyek Keberhasilan tumbuh Jumlah dan jenis flora darat 	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Metode Pengumpulan Data : Pengamatan dan pengukuran menggunakan GPS atau citra satelit; Mengukur persentase tumbuh tanaman mangrove yang ditanam Inventarisasi jenis Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan kualitatif	Di lokasi penanaman mangrove <u>Lokasi transek 1:</u> 108° 37' 39.456"BT 6° 46' 17.329"LS Di kawasan RTH di dalam area PLTU dan lokasi penanaman mangrove <u>Lokasi RTH atau di dalam area PLTU:</u> 108° 37' 48.373" BT 6° 46' 39.361"LS	3 (tiga) bulan sekali setelah kegiatan penanaman dimulai	PT. CEPR	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon, Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
12.	Perubahan komunitas fauna darat	Jumlah jenis dan jumlah individu	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Metode Pengumpulan Data : Pengamatan secara langsung di lapangan: Kegiatan inventarisasi jenis-jenis fauna dengan metode <i>Visual Encounter Survey</i> (VES), penjelajahan jalur dan <i>Index Point of Abundance</i> (IPA). Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Hutan mangrove di sekitar PLTU, yaitu pada koordinat berikut: <u>Lokasi transek 1:</u> 108° 37' 39.456"BT 6° 46' 17.329"LS <u>Lokasi RTH atau di dalam area PLTU:</u> 108° 37' 48.373" BT 6° 46' 39.361"LS	3 (tiga) bulan sekali setelah setelah penanaman mangrove dimulai	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
13.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul Jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi 	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Survei dengan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi foto 	<ul style="list-style-type: none"> Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa 	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Tenaga Kerja

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		lokal yang menjalin kemitraan dengan perusahaan		usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Astanamukti, dan Desa Pengarengan. ▪ Kantor PLTU (Bagian CSR)				Kabupaten Cirebon. DLH Provinsi Jawa Barat
14.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja. Tingkat pendapatan masyarakat 	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU. Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
15.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif. 	Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. 	<ul style="list-style-type: none"> Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan terkait kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja 		<ul style="list-style-type: none"> Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja Metode Analisis Data : Metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif					
16.	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan	Pembangunan jalan akses	Metode Pengumpulan Data : Mengukur kebisingan menggunakan <i>soundlevel meter</i> dan dihitung Ls, Lm dan Lsm sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Metode Analisis Data : Membandingkan hasil pengukuran dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan peruntukkan pemukiman, yaitu 55+3 dB(A).	Lokasi pembangunan jalan akses terdekat dengan pemukiman penduduk. <ul style="list-style-type: none"> Pada koordinat 108° 37' 31.646" BT; 6° 46' 58.051" LS Pada koordinat 108° 38' 3.948"BT; 6° 47' 8.242"LS 	Sekali selampembangun an jalan akses pada saat intensitas tinggi	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
17.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan dengan perusahaan 	Pembangunan jalan akses	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Survei dengan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. Kantor PLTU 	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
18.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja. Tingkat pendapatan masyarakat 	Pembangunan jalan akses	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif					Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
19.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif. Jumlah keluhan terkait kegiatan Pembangunan jalan akses 	Pembangunan jalan akses	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan Pembangunan jalan akses Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan Kantor PT. CEPR 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
20.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan dengan perusahaan 	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> Survei dengan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. Kantor PLTU (Bagian CSR) 	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
21.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja. Tingkat pendapatan masyarakat 	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU. Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
22.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif. Jumlah keluhan terkait kegiatan pembangunan PLTU dan fasilitasnya 	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Metode Analisis Data : Metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan Kantor PT. CEPR (bagian CSR) 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
23.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan dengan perusahaan 	Pembangunan dermaga	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Survei dengan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif.	<ul style="list-style-type: none"> Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. Kantor PT. CEPR (bagian CSR) 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
24.	Gangguan aktivitas nelayan pinggiran dan nelayan yang melaut	Keluhan dari nelayan terkait kegiatan pembangunan dermaga	Pembangunan dermaga	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Survei dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi foto aktivitas nelayan melaut di area pembangunan dermaga dan jumlah keluhan yang masuk ke PLTU Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Perkampungan nelayan di wilayah studi Area pembangunan dermaga Kantor PT. CEPR (bagian CSR) 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
25.	Gangguan aktivitas budidaya kerang	Adanya keluhan dari nelayan budidaya kerang hijau di wilayah studi terkait kegiatan pembangunan dermaga	Pembangunan dermagapermanen sepanjang 2,7 Km.	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Survei dengan menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi foto aktivitas budidaya kerang di area pembangunan dermaga Metode Analisis Data : Analisis data menggunakan metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Perkampungan nelayan di wilayah studi Area pembangunan dermaga Kantor PT. CEPR (bagian CSR) 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
26.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja. Tingkat pendapatan masyarakat 	Pembangunan dermagapermanen sepanjang 2,7 Km.	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU.	Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon	DLH Kabupaten Cirebon, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
27.	Persepsi dan sikap masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.	Pembangunan dermaga permanen sepanjang 2,7 Km.	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
		Jumlah keluhan terkait kegiatan pembangunan dermaga		Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja	Kantor PT. CEPR (bagian CSR)				
28.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja. Tingkat pendapatan masyarakat 	Pelepasan tenaga kerja Tahap Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
29.	Peningkatan keterampilan	Meningkatnya kemampuan (<i>skill</i>) tenaga kerja lokal yang terkena atau akan terkena PHK	Pelepasan tenaga kerja Tahap Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa 	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Konstruksi dan 6 (enam) bulan	PT. CEPR	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon	DLH Kabupaten Cirebon, DLH Provinsi

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<p>mendalam.</p> <ul style="list-style-type: none"> Studi dokumentasi meliputi jumlah pelatihan keterampilan serta jumlah tenaga kerja lokal yang memperoleh pelatihan selama Tahap Konstruksi <p>Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif.</p>	<p>Pengarengan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kantor PT. CEPR (bidang HRD) 	<p>setelah kegiatan pelepasan tenaga kerja.</p>			<p>Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon</p>
30.	Peningkatan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah dan kriteria tenaga kerja lokal yang direkrut Tersedianya media pengumuman di balai desa di 5 desa studi. Proporsi tenaga kerja lokal terhadap total tenaga kerja Tahap Operasional minimal sebesar 40%. Memastikan bahwa pemrakarsa dan kontraktor telah bekerjasama dengan Komite Tenaga Kerja Lokal dalam proses perekrutan tenaga kerja Tahap Operasional. 	Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasional	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wawancara secara mendalam dengan wakil masyarakat dalam Komite tenaga kerja lokal yang dibentuk. Studi dokumentasi meliputi tenaga kerja yang direkrut dari HRD PT. CEPR dan fotopengumuman rekrutment <p>Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. Kantor PT. CEPR (bidang HRD) 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.
31.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif. Jumlah keluhan terkait kegiatan Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasional 	Penerimaan tenaga kerja Tahap Operasional	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Studi dokumentasi foto survei dan wawancara Survei terhadap masyarakat terkena dampak menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam. <p>Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. Kantor PT. CEPR. (Bidang CSR). 	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
C. TAHAP OPERASI									
1.	Gangguan aktivitas nelayan melaut	Keluhan dari nelayan terkait kegiatan operasional dermaga	Operasional dermaga (bongkar muat batubara)	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surveidengan menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi foto aktivitas nelayan melaut di jalur mobilisasi peralatan dan material dan jumlah keluhan yang masuk ke PLTU Survey tentang aktivitas dan hasil tangkapan nelayan pinggiran laut yang mencari ikan, udang kecil (rebon) dan kerang. <p>Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perkampungan nelayan di wilayah studi Kantor PT. CEPR (bagian CSR) 	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon.	DLH Kabupaten Cirebon, DLH Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon.
2.	Persepsi dan sikap masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.	Operasional dermaga (bongkar muat batubara)	<p>Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.</p>	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali sejak Tahap Operasi dimulai	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Jumlah keluhan terkait kegiatan operasional dermaga		Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan operasional dermaga Metode Analisis Data : Deskriptif kuantitatif dan/atau kualitatif.	Kantor PT. CEPR (bagian CSR)				
3.	Penurunan kualitas udara ambien	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penanganan batubara di <i>stockyard</i> sesuai dengan rencana pengelolaan TSP, dan PM₁₀ 	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Metode Pengumpulan Data : Pengamatan langsung penanganan batubara di <i>stockyard</i> <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel dan analisis parameter : TSP, dan PM₁₀, mengikuti pedoman yang digunakan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh KAN ; Metode Analisis Data : Melakukan analisis laboratorium yang terakreditasi KAN KAN dan dilakukan berdasarkan pada pedoman "Standard Nasional Indonesia" dan membandingkan dengan baku mutu	Area <i>stockyard</i>	6 (enam) bulan sekali sejak Tahap Operasi dimulai	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
4.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif. Jumlah keluhan terkait kegiatan pembangunan dermaga 	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan pematangan lahan dan penyiapan areal kerja Metode Analisis Data : Metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan Kantor PT. CEPR (bagian CSR)	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat
5.	Gangguan penyakit	Jumlah kasus gangguan saluran nafas (khususnya ISPA)	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data bulanan kasus penyakit dari Puskesmas; Wawancara dengan masyarakat mengenai keluhan pada saluran pernafasan (ISPA); Pengamatan terhadap sanitasi lingkungan Metode Analisis Data : Deskripsi dengan melihat <i>incident rate</i> kasus penyakit saluran pernafasan.	Puskesmas setempat Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 bulan sekali setelah dimulainya kegiatan Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	PT. CEPR	Dinas Kesehatan Kab. Cirebon	Dinas Kesehatan dan DLH Kab. Cirebon dan Prov. Jabar
6.	Penurunan kualitas udara ambien	<ul style="list-style-type: none"> Parameter Sulfur dioksida (SO₂), Nitrogen dioksida (NO₂), CO dan partikulat (TSP, PM₁₀, PM_{2,5}) serta debu jatuh sesuai PP RI No. 41/1999). Parameter Sulfur dioksida (SO₂), Nitrogen dioksida (NO₂), Total 	Operasional unit PLTU	Metode Pengumpulan Data : Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan dengan cara manual dengan metode: <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel TSP mengacu pada SNI-19-7119.3-2005; Pengambilan sampel PM₁₀ mengacu pada USEPA IO-2.1; Pengambilan sampel PM_{2,5} 	Area tapak proyek dan pemukiman terdekat dengan area unit PLTU yaitu Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Cara manual : setiap 6 (enam) bulan sekali CEMS: setiap hari selama 24 jam	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar

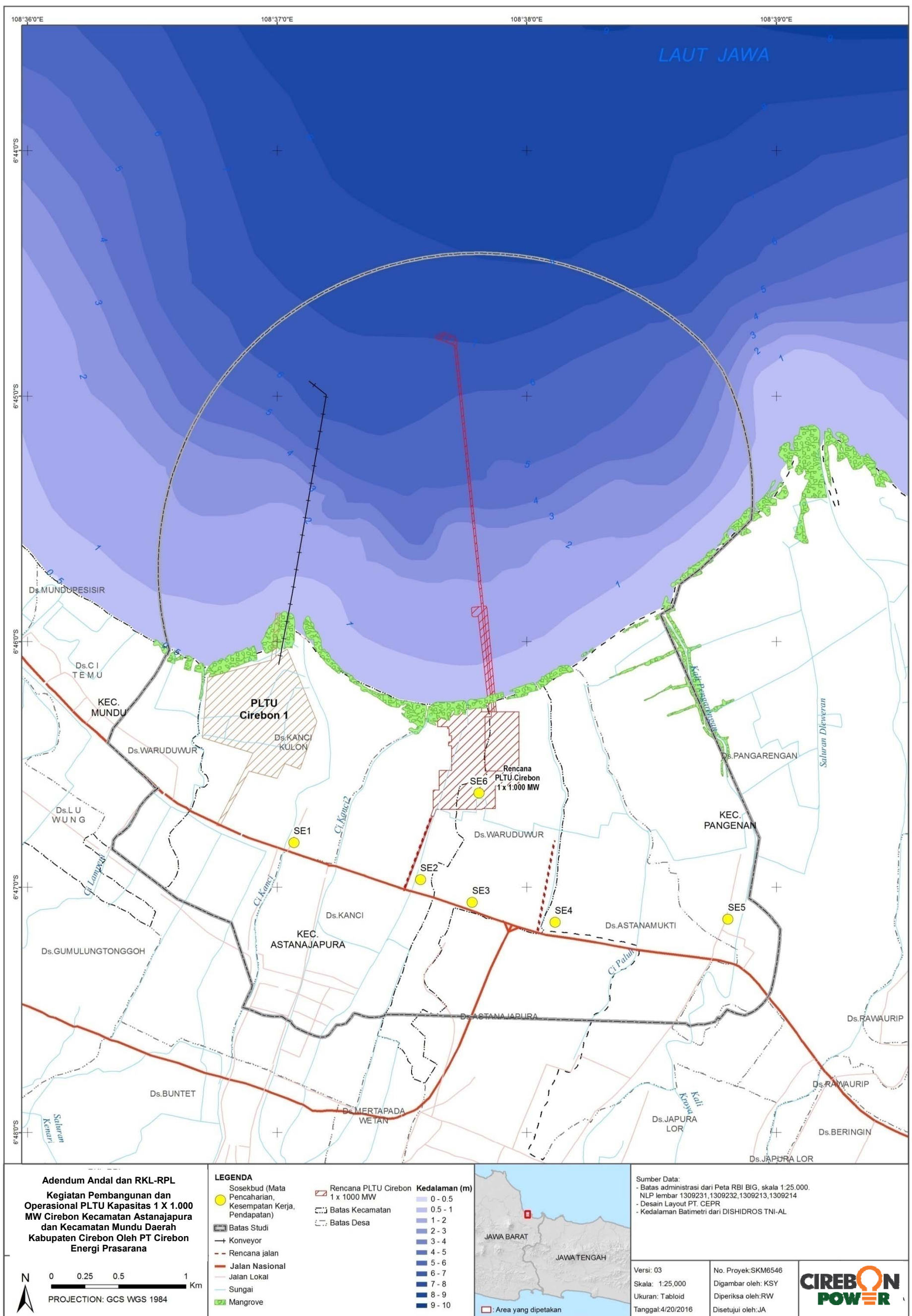
No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Partikulat, dan Opasitas sesuai PerMenLH No 21 Tahun 2008.		<p>mengacu pada USEPA IO-2.1;</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel SO₂ mengacu pada SNI-19.7119.7-2005; Pengambilan sampel NO₂ mengacu pada SNI-19-7119.2-2005; Pengambilan sampel CO mengacu pada SNI 7119.10:2011; Pengambilan sampel debu jatuh mengacu pada SNI-13-4703-1998 Pemantauan kualitas udara emisi dilakukan dengan menggunakan CEMS yang terkalibrasi untuk parameter Total Partikulat, SO₂, NO₂, O₂ dan opasitas. Pemeriksaan terhadap dokumentasi terkait dengan operasional ESP, FGD, fabric filter dan <i>Low NOx burner</i> berfungsi baik dan optimal <p>Metode Analisis Data : Melakukan analisis laboratorium yang terakreditasi KAN KAN dan dilakukan berdasarkan pada pedoman "Standard Nasional Indonesia" dan membandingkan dengan baku mutu yang ditetapkan.</p>	<p>Lokasi 1: 108° 37' 48.646" BT; 6° 46' 25.834" LS</p> <p>Lokasi 2: 108° 37' 15.423" BT 6° 46' 52.424" LS</p> <p>Lokasi 3: 108° 37' 42.341" BT; 6° 47' 2.022" LS</p> <p>Lokasi 4: 108° 38' 5.607" BT; 6° 47' 10.369" LS</p> <p>Lokasi 5: 108° 38' 44.940" BT 6° 47' 12.977" LS</p> <p>Lokasi 6: 108° 38' 52.659" BT 6° 46' 51.694" LS</p>				
7.	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan sesuai dengan KepMenLH No. 48 tahun 1999 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Operasional unit PLTU	<p>Metode Pengumpulan Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengamatan langsung pelaksanaan pengelolaan dampak kebisingan sesuai dengan rencana, antara lain terhadap: <ul style="list-style-type: none"> Penggunaan alat-alat mekanikal sumber bising Penanaman pohon di sekeliling area PLTU sebagai <i>green barrier</i>. Mengukur kebisingan menggunakan <i>soundlevel meter</i> dan dihitung L_S, L_M dan L_{SM} <p>Metode Analisis Data : Membandingkan tingkat kebisingan dengan baku mutu menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.</p>	<p>Area power Block PLTU dan sekitar PLTU</p> <p>Lokasi 1: 108° 37' 48.646" BT; 6° 46' 25.834" LS</p> <p>Lokasi 2: 108° 37' 15.423" BT 6° 46' 52.424" LS</p> <p>Lokasi 3: 108° 37' 42.341" BT; 6° 47' 2.022" LS</p> <p>Lokasi 4: 108° 38' 5.607" BT; 6° 47' 10.369" LS</p> <p>Lokasi 5: 108° 38' 44.940" BT 6° 47' 12.977" LS</p> <p>Lokasi 6:</p>	6 (enam) bulan sekali selama Tahap Operasi	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
8.	Penurunan kualitas air laut	<ul style="list-style-type: none"> Parameter kualitas air laut sesuai KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004 Lampiran III 	Operasional unit PLTU	Metode Pengumpulan Data : Pengambilan contoh air laut secara <i>duplo</i> pada kedalaman 1-2 m (permukaan) dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN	108° 38' 52.659" BT 6° 46' 51.694" LS Di perairan laut pada koordinat <u>Lokasi 1</u> 108° 37' 45.144" E 6° 46' 11.905" S <u>Lokasi 2</u> 108° 37' 56.034" E 6° 45' 49.081" S <u>Lokasi 3</u> 108° 37' 41.793" E 6° 44' 42.373" S <u>Lokasi 4</u> 108° 37' 28.057" E 6° 45' 45.261" S <u>Lokasi 5</u> 108° 37' 45.058"E 6° 46' 5.565" S	6 (Enam) bulan sekali selama operasional unit PLTU untuk air laut	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
		<ul style="list-style-type: none"> Parameter kualitas limbah cair sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2009 Lampiran I 		pengambilan sampel air limbah secara <i>duplo</i> dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN Metode Analisis Data : Membandingkan data hasil pemantauan dengan baku mutu yang berlaku.	di titik penataan izin pembuangan limbah cair (IPLC)				
9.	Perubahan komunitas biota laut (gangguan terhadap biota laut)	<ul style="list-style-type: none"> Struktur komunitas biota laut (bentos dan nekton) setara dengan kondisi awal 	Operasional unit PLTU	Metode Pengumpulan Data : - Pengumpulan contoh bentos menggunakan <i>grab sampler</i> sebanyak 3 contoh di setiap titik, kemudian diidentifikasi sampai ke taksa terendah.	Di perairan laut pada koordinat <u>Lokasi 1</u> 108° 37' 45.144" E 6° 46' 11.905" S <u>Lokasi 2</u> 108° 37' 56.034" E 6° 45' 49.081" S <u>Lokasi 3</u> 108° 37' 41.793" E 6° 44' 42.373" S <u>Lokasi 4</u> 108° 37' 28.057" E 6° 45' 45.261" S <u>Lokasi 5</u> 108° 37' 45.058"E 6° 46' 5.565" S	6 (enam) bulan sekali selama operasional unit PLTU	PT. CEPR	Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
				Inventarisasi jenis nekton laut hasil tangkapan nelayan setempat Metode Analisis Data : Menganalisis bentos di laboratorium (nama jenis dan jumlah individu setiap jenis, indeks keanekaragaman, indeks dominansi, dan indeks pemerataan) Mengevaluasi perubahan hasil tangkapan ikan dan jenis tangkapan ikan nelayan dari waktu ke waktu	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setempat				

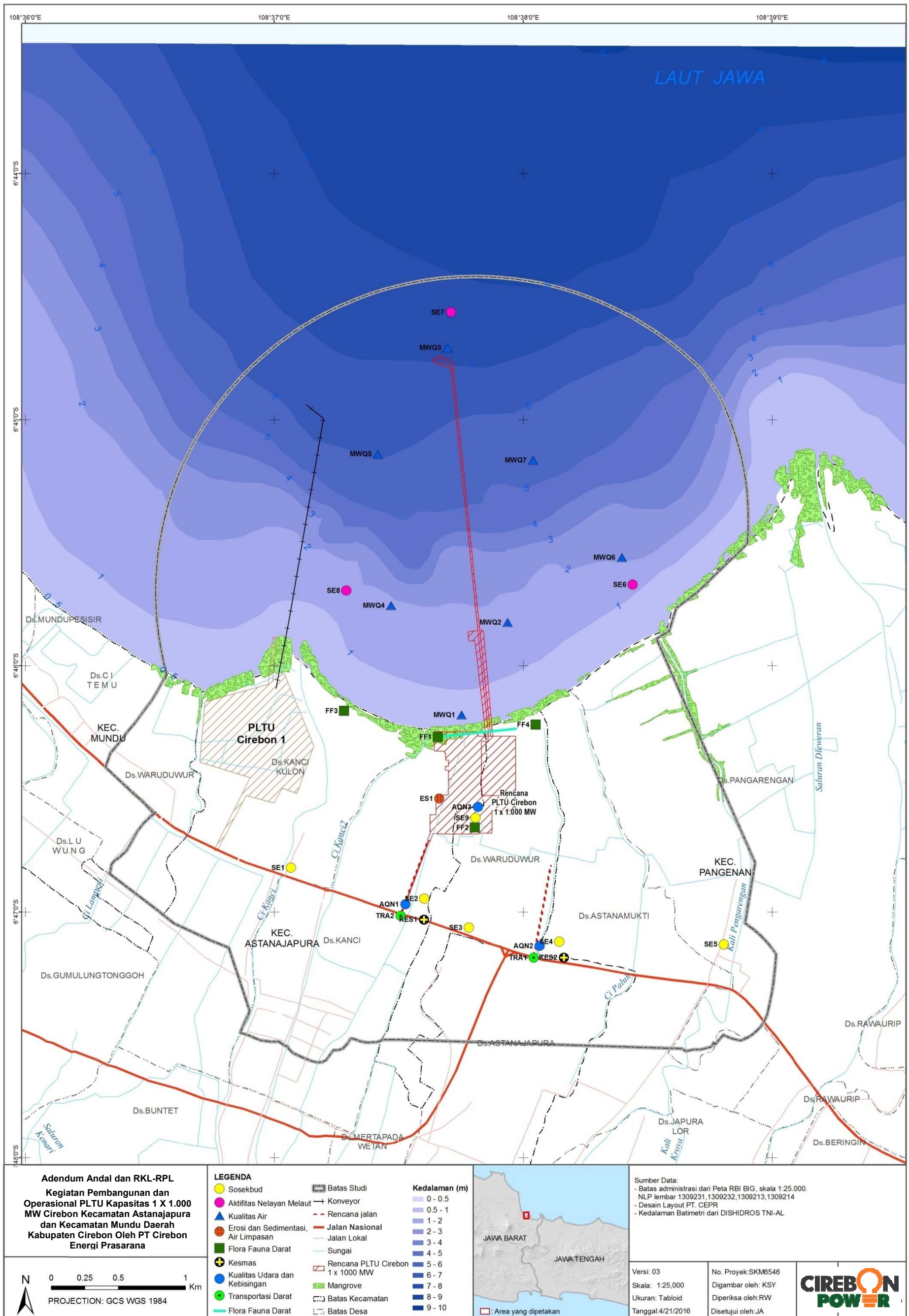
No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
10.	Peningkatan peluang usaha	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis usaha baru yang timbul jumlah pengusaha lokal/lembaga ekonomi lokal yang menjalin kemitraan dengan perusahaan 	Operasional unit PLTU	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> Survei dengan wawancara mendalam. Studi dokumentasi meliputi foto usaha baru yang dibuka masyarakat terdampak, data kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. Kantor PT. CEPR (bagian CSR) 	6 (enam) bulan sekali selama masa operasi berlangsung.	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.	DLH Kab. Cirebon dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon.
11.	Perubahan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pendapatan yang diterima sebagai tenaga kerja. Tingkat pendapatan masyarakat 	Operasional unit PLTU	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam kepada pekerja lokal di PLTU dan masyarakat yang tidak bekerja di PLTU.	Pemukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.	6 (enam) bulan sekali selama masa operasi berlangsung.	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kabupaten Cirebon
12.	Persepsi dan sikap masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif. 	Operasional unit PLTU	Metode pengumpulan data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama masa konstruksi	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kabupaten Cirebon
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluhan terkait kegiatan operasional unit PLTU 		Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan operasional unit PLTU	Kantor PT. CEPR (bagian CSR)				
13.	Gangguan penyakit	Jumlah kasus gangguan saluran nafas (khususnya ISPA)	Operasional unit PLTU	Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data bulanan kasus penyakit dari Puskesmas; 	Puskesmas setempat	Enam bulan sekali selama operasional unit PLTU	PT. CEPR	Dinas Kesehatan Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
				<ul style="list-style-type: none"> Wawancara dengan masyarakat mengenai keluhan pada saluran pernafasan (ISPA); 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan				
				<ul style="list-style-type: none"> Pengamatan terhadap sanitasi lingkungan Metode Analisis Data : Deskripsi dengan melihat <i>incident rate</i> kasus penyakit saluran pernafasan.					
14.	Persepsi dan sikap masyarakat	Jumlah masyarakat yang mempunyai persepsi negatif.	Penyimpanan sementara abu batubara	Metode Pengumpulan Data: Survei menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	6 (enam) bulan sekali selama masa operasi berlangsung.	PT. CEPR	DLH Kabupaten Cirebon	DLH Kabupaten Cirebon
		Jumlah keluhan terkait kegiatan penyimpanan sementara abu batubara		Studi dokumentasi meliputi pencatatan jumlah keluhan pada kegiatan penyimpanan sementara abu batubara	Kantor PT. CEPR				
15.	Gangguan penyakit	Jumlah kasus gangguan saluran nafas (khususnya	Penyimpanan sementara abu	Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data bulanan kasus 	Puskesmas setempat	6 (Enam) bulan sekali selama	PT. CEPR	DLH Kabupaten	DLH Kab. Cirebon dan

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		ISPA)	batubara	penyakit dari Puskesmas; <ul style="list-style-type: none"> Wawancara dengan masyarakat mengenai keluhan pada saluran pernafasan (ISPA); Pengamatan terhadap sanitasi lingkungan Metode Analisis Data : Deskripsi dengan melihat <i>incident rate</i> kasus penyakit saluran pernafasan.	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	penyimpanan sementara abu batubara		Cirebon	DLH Prov. Jabar
D. Dampak Lingkungan Lainnya Yang Dipantau									
1.	Penurunan kualitas air permukaan	Kualitas air permukaan memenuhi baku mutu sesuai aturan yang berlaku	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel air permukaan secara <i>duplo</i> di outlet pengolahan air limbah dan badan air penerima dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi KAN. Pengambilan sampel air, pengawetan sampel dan analisis laboratorium dilakukan dengan pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang diterima secara ilmiah 	Di titik penaatan izin pembuangan limbah cair (IPLC)	6 (enam) bulan sekali untuk badan air penerima dan 1 (satu) bulan sekali untuk outlet air limbah atau sesuai perijinan PPLH yang akan diberlakukan	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
2.	Penurunan kualitas air tanah	Kualitas air tanah sesuai dengan kondisi awal	Penyimpanan batubara di <i>stockyard</i>	Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel air tanah di sumur pantau dan sumur penduduk dan kemudian dianalisis di laboratorium. Pengambilan sampel air, pengawetan sampel dan analisis laboratorium dilakukan dengan pedoman Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang diterima secara ilmiah. Metode Analisis Data : Membandingkan data hasil pemantauan dengan baku mutu kualitas air yang berlaku	Tempat penyimpanan batubara di <i>stockyard</i> dan minimal satu sumur penduduk terdekat.	6 (Enam) bulan sekali selama Tahap Operasi atau sesuai perijinan PPLH yang akan diberlakukan untuk sumur pantau	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
3.	Penurunan sanitasi lingkungan	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sesuai dengan yang direncanakan, berupa: penyediaan tempat penampungan limbah padat (Tahap Konstruksi), <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP) (Tahap Konstruksi dan Operasi), serta penampungan sampah non B3 (Tahap Konstruksi)	<ul style="list-style-type: none"> Pematangan lahan dan penyiapan areal kerja Pembangunan jalan akses Pembangunan PLTU dan fasilitasnya 	Metode Pengumpulan Data : <ul style="list-style-type: none"> Studi dokumentasi, meliputi foto. Observasi lapangan Metode Analisis Data : Analisis secara dekriptif kualitatif	Area PLTU	6 (enam) bulan sekali sejak Tahap Konstruksi dimulai	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon dan Dinas Kesehatan Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar
4.	Limbah B3	Parameter sesuai Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3	Kegiatan konstruksi & operasi PLTU	Metode Pengumpulan Data : Mengacu pada Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang	Area PLTU	3 bulan sekali selama Tahap Operasi atau sesuai perijinan	PT. CEPR	DLH Kab. Cirebon	DLH Kab. Cirebon dan DLH Prov. Jabar

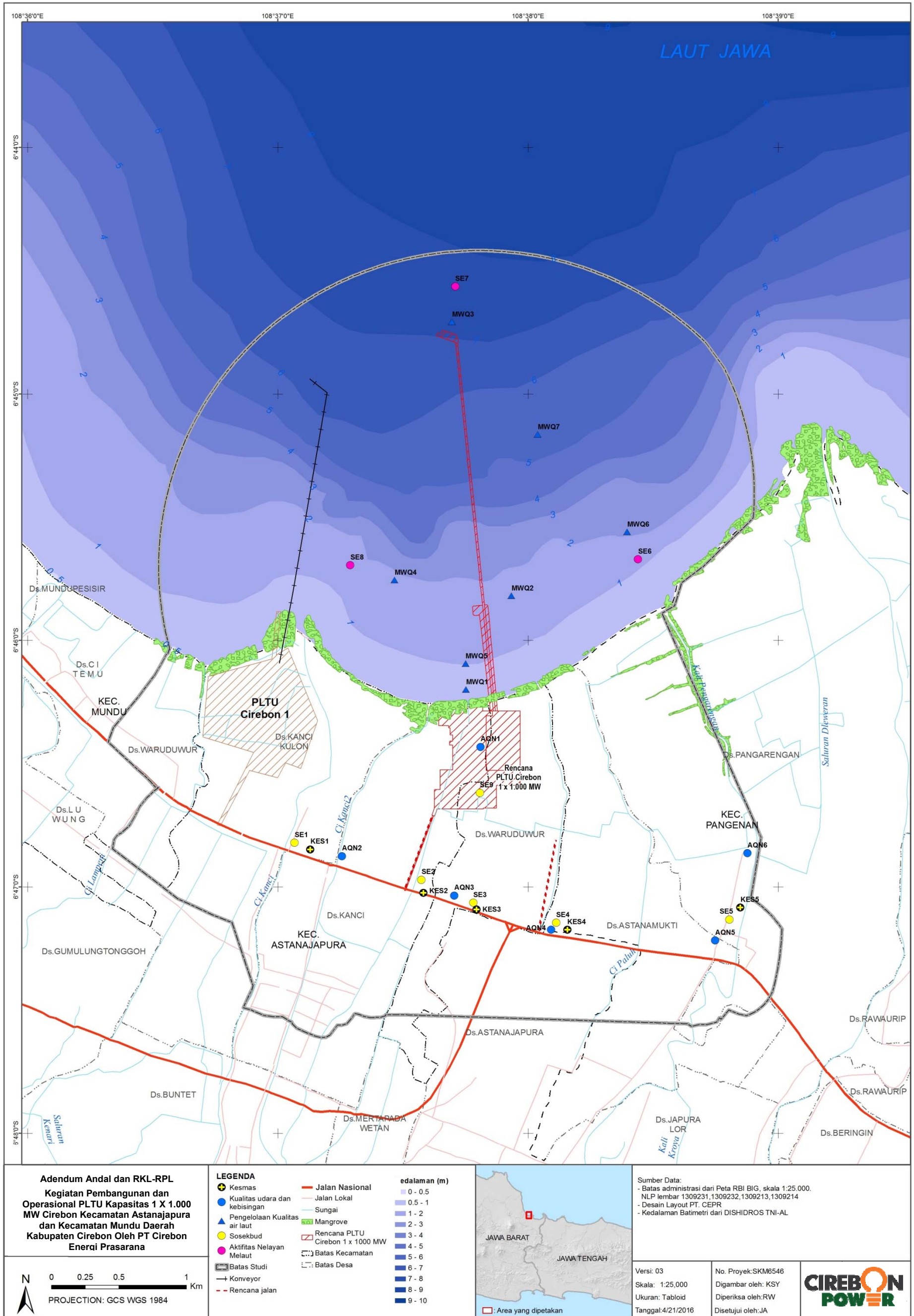
No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Pengelolaan Limbah B3 Metode Analisis Data : Deskriptif kualitatif		PPLH yang akan diberlakukan			



Gambar 6-1 Peta lokasi pemantauan pada Tahap Pra Konstruksi.



Gambar 6-2 Peta lokasi pemantauan pada Tahap Konstruksi.



Gambar 6-3 Peta lokasi pemantauan pada Tahap Operasi

ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Oleh PT Cirebon Energi Prasarana

BAB VII

JUMLAH DAN JENIS

IZIN PPLH YANG

DIBUTUHKAN



PT CIREBON ENERGI PRASARANA

Wisma Pondok Indah Tower 3, Lt. 25

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V – TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan Telp : 021 2932 7990, Fax : 021 2932 7991

Email : amdal@cepr.co.id

7.0 JUMLAH DAN JENIS IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIBUTUHKAN

Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH) yang dibutuhkan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, antara lain, disajikan pada Tabel 7.1:

Tabel 7. 1. Jumlah dan Jenis Izin PPLH Yang Dibutuhkan

No.	Jenis Izin PPLH	Ya	Tidak
1.	Izin Pembuangan Limbah Cair	-	√
2.	Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah (<i>Land Application</i>)	-	√
3.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		
	▪ Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	√	-
	▪ Izin Pengumpulan Limbah B3	-	√
	▪ Izin Pemanfaatan Limbah B3	-	√
	▪ Izin Pengolahan Limbah B3	-	√
	▪ Izin Penimbunan Limbah B3	-	√
4.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut	√	-
5.	Izin <i>Dumping</i> ke Laut	-	√
6.	Izin Reinjeksi ke Dalam Formasi	-	√
7.	Izin Venting ke Udara	-	√

- Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. PT. CEPR harus mendapatkan izin tersebut karena limbah B3 (seperti *fly ash*, *bottom ash* dan lainnya) akan disimpan untuk sementara waktu hingga diangkut oleh pengolah/pemanfaat yang berizin; dan
- Izin pembuangan air limbah ke laut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Oleh PT Cirebon Energi Prasarana

**PERNYATAAN
KOMITMEN
PELAKSANAAN
ADENDUM RKL-RPL**



PT CIREBON ENERGI PRASARANA

Wisma Pondok Indah Tower 3, Lt. 25

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V – TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan Telp : 021 2932 7990, Fax : 021 2932 7991

Email : amdal@cepr.co.id

PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660/07/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Tanggal 13 Juli 2017 dan Nomor 660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Izin Lingkungan tanggal 17 Juli 2017 untuk Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT Cirebon Energi Prasarana, maka saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heru Dewanto
Jabatan : Presiden Direktur
Nama Pemrakarsa : PT Cirebon Energi Prasarana
Alamat : Wisma Pondok Indah, Office Tower 3, 25th Floor, Suite 2502
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav.V-TA, Pondok Indah, Jakarta
Selatan 12310, Indonesia
No. Telp/Fax : +62 (21) 2765 0795/ 27650796

Selaku Penanggung Jawab atas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dari kegiatan:

Nama Kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Jenis Dokumen Kegiatan : Adendum Andal dan RKL-RPL

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa:

1. Kami bersedia melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagaimana terlampir dalam Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon Oleh PT Cirebon Energi Prasarana yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Bertanggung jawab dan bersedia diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan apabila saya terbukti lalai/tidak melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL;

3. Bertanggung jawab dan bersedia melaporkan pelaksanaan/implementasi RKL/RPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sampai selesainya kegiatan pembangunan dan selama kegiatan operasi, saya bertanggung jawab dan bersedia melaporkan implementasi RKL/RPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
4. Bersedia dipantau atau dilaksanakan pengawasan oleh Dinas/Instansi terkait terhadap Implementasi Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan hidup (RPL).

Demikian Surat Pernyataan Komitmen Pelaksanaan RKL-RPL ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan kami.

Jakarta, 19 Juli 2017



Heru Dewanto
Presiden Direktur



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heru Dewanto
Jabatan : Presiden Direktur
Nama Pemrakarsa : PT Cirebon Energi Prasarana
Alamat : Wisma Pondok Indah, Office Tower 3, 25th Floor, Suite 2502
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav.V-TA, Pondok Indah, Jakarta
Selatan 12310, Indonesia
No. Telp/Fax : +62 (21) 2765 0795/ 27650796

Selaku Penanggung Jawab atas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dari kegiatan:

Nama Kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Jenis Dokumen Kegiatan : Adendum Andal dan RKL-RPL

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dari kegiatan dimaksud, dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Desa setempat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon secara berkesinambungan;
3. Akan menggunakan bahan material untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari *quarry* yang berizin/legal;
4. Akan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Akan mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
6. Akan mengajukan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahap operasional, yaitu:
 - a. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - b. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut.



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan kami.

Jakarta, 19 Juli 2017



Heru Dewanto
Presiden Direktur



ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Oleh PT Cirebon Energi Prasarana

DAFTAR PUSTAKA



PT CIREBON ENERGI PRASARANA

Wisma Pondok Indah Tower 3, Lt. 25

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V – TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan Telp : 021 2932 7990, Fax : 021 2932 7991

Email : amdal@cepr.co.id

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, S 1990. Metode Evaluasi Dampak, Makalah Kursus Penyusunan AMDAL. Fakultas Pertanian IPB, Bogor .
- Afianti, N. 2007. Makalah Metode, Teknik Pengambilan Sampel dan Analisis Data Komponen Hayati. PPLH Lembaga Penelitian UNDIP, Semarang.
- Alikodra, H.S. 1980. Pengelolaan Satwa Liar. Jilid I. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Alikodra, H.S., J.B. Hernowo, Y.A. Mulyani, B. Van Balen., R. Avenzora, N. Santoso, and H. Arif. 1989. Peranan hutan mangrove untuk pelestarian burung air. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Anonymous, 2005, Bahan-bahan Berbahaya dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Manusia (buku 1-3), Departemen Kesehatan RI, Ditjen PPM dan PL, Jakarta.
- Anonymous, 2005, Parameter Pencemar Udara dan Dampaknya Terhadap Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Anonymous, 2010, Pedoman Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Amdal, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Anonymous. 2014, Rencana Kerja Pembangunan Desa. RKP-Desa Astanamukti tahun 2014.
- Anonymous. 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJM Desa Kanci 2011-2015.
- Anonymous. 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJM Desa Pengarengan 2011-2015.
- Anonymous. 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. RPJM Desa Waruduwur 2011-2015.
- APHA (American Public Health Association. 2012. Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater. 22nd Edition. American Public Association. Washington.
- APHA, 2002. Standard Methods for Sxamination Water and Waste Water. American Public Health Association. Washington DC.
- Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. Penerbit IPB (IPB Press). Bogor.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2014a. Kecamatan Astanajapura dalam angka 2014. BPS Kabupaten Cirebon.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2014b. Kecamatan Mundu dalam angka 2014. BPS Kabupaten Cirebon.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2014c. Kabupaten Cirebon dalam angka 2014. BPS Kabupaten Cirebon.
- Bibby, C., Jones, M., Marsden, S. 2000. Teknik–Teknik Ekspedisi Lapangan Survei Burung. BirdLife International-Indonesia Programme, Bogor.
- Borror, D.J., C.A. Triplehorn & N.F. Johnson. 1996. *Pengenalan pelajaran serangga*. ed. Ke-6. Terjemahan dari *An introduction to the study of insects*. 6th. Ed., penterjemah Partosoedjono, S. & M.D. Brotowidjoyo. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- CEPR, 2016. AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon. Jawa Barat
- CITES, 2015. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. www.cites.org.

- Cooper, C.D. and F.C. Alley. 1986. Air pollution Control: A Design Approach. Waveland Press: Michigan, USA.
- Cox, J.M., Van Dijk, P.P., Nabithabhata, J., and K. Thirakhupt 1998. A Photographic Guide to Snakes and Other Reptiles of Peninsular Malaysia, Singapore and Thailand. New Holland Publishers (UK) Ltd.
- David Kurniawan. 2012. Analisis Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Terhadap Perekonomian Indonesia. Tesis. Fakultas Ekonomi, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia.
- De Rooij, N. 1915. *The Reptiles of Indo-Australian Archipelago*. E.J Brill, Ltd, Leiden.
- Deputi Tata Lingkungan-Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2007. Kualitas Udara. Jakarta. Danish International Development Agency (DANIDA).
- D.M. Scott, D. Novak, L. Aultman-Hall, F. Guo. 2005. Network Robustness Index: A New Method for Identifying Critical Links and Evaluating the Performance of Transportation Networks Centre for Spatial Analysis - Working Paper Series.
- Edmundson W.T. 1995. Freshwater Biology. John Willey & Sons Inc. New York, USA.
- Edwards M, Hurley P, and Physick B, Verification of TAPM meteorological predictions using sodar data in the Kalgoorlie region, CSIRO, 2004.
- Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air. Kanisius. Yogyakarta
- Environment Australia. 2012. NPI - Emission Estimation Technique Manual for Mining. Version 2.3. Table 1 & Table 3 Emission Factor Equations and Default Emission Factors for Various Operations at Coal Mines.
- Fandeli, C. 2000. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar, dan Penerapannya dalam Pembangunan Edisi Revisi. Liberty. Yogyakarta.
- Giesen, W., S. Wulffraat, M. Zieren & L. Scholten. 2007. Mangrove Guidebook for Southeast Asia. FAO and Wetlands International, Bangkok.
- Hammer, W.I. 1981. Second Soil Conservation Consultant Report. AGOF/INS/78/006. Tech. Note No. 10. Centre for Soil Research. Bogor. Indonesia.
- Heyer WR, Donnelly MA, McDiarmid RV, Hayek LA, Foster MS. (eds). 1994. Measuring and Monitoring Biological Diversity. Standard Methods for Amphibians. Smithsonian Institution Press, Washington DC.
- Hibberd M, Physick B, and Park G. 2003. Verifications of several aspects of TAPM against multi-year monitoring data at Collie., Proceedings of the 17th International Clean Air Conference.
- http://www.cat.com/id_ID/products/new/equipment/excavators/mini-excavators/17434486.html
diakses bulan Januari 2016
- Indopower International, 2013. Pre Feasibility Study Report Cirebon Expansion CFSP 1,000MW. Cirebon Electric Power, Cirebon.
- ILO. 2015. Tren Ketenaga Kerjaan dan Sosial di Indonesia 2014 – 2015 : Memperkuat Daya Saing dan Produktifitas Melalui Pekerjaan Yang Layak.
- Iskandar, D.T. 1998. Amphibi Jawa dan Bali (The amphibian of Java and Bali). Puslitbang Biologi-LIPI, Bogor.
- Iskandar, D.T & E. Colijn, 2000. A checklist of Southeast Asian and New Guinean Reptiles. Part I. The Gibbon Foundation and Institute of Technology, Bandung.
- IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, 2015.2. www.iucnredlist.org
- Sinclair Knight Merz, 2014. Cirebon Unit 2 Esia. Air dispersion modelling of EPC Guarantees Emission Concentrations. SKM, Jakarta.

- Kottelat, M., A.J. Whitten, S.N. Kartikasari & S. Wirjoatmodjo. 1993. *Freshwater fishes of western Indonesia and Sulawesi*. Periplus Editions Ltd, Hongkong.
- Krebs, C.J. 1989. *Ecological Methodology*. Harper Collins Publisher.
- Kusliansjah, K & A. Ramadhan, 2012. Laporan Hasil Penelitian Arsitektur Kota Tahun 2012: Struktur Pesisir (*Waterfront*) Kota Cirebon-Jawa Barat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Kusrini, M.D. 2013. Panduan Bergambar Identifikasi Amfibi Jawa Barat. Fakultas Kehutanan IPB dan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati.
- Lee, C.D., S.B. Wang, and C.L. Kuo. 1978. Benthic Macroinvertebrate and Fish as Biological Indicator of Water Quality with References to Community Diversity Development Countries.
- MacKinnon, J., K. Phillipps, B.v. Balen. 2010. Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Bird-Life International Indonesia Programme. Jakarta, Indonesia.
- Magurran, A.E. 1988. *Ecological Diversity and It's Measurement*. New Jersey: Princetone University Press.
- Magurran, A. E. 2004. *Measuring biological diversity*. Blackwell Publishing. [ISBN 0-632-05633-9](https://doi.org/10.1002/9781118166761)
- Marifa, I, R. Yuwono, M.T. Afiff, E.J. Sundana, M.T. Sugandi, Zarkoni, & M.N. Sjach. 2007. Panduan Pelingkupan dalam AMDAL. Deputi Bidang Tata Lingkungan – Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Maryanto, I., A.S. Ahmadi, & A.P. Kartono. 2008. Mamalia dilindungi perundang-undangan Indonesia (Mammals protected by Indonesian law). LIPI Press, Jakarta.
- Metcalf dan Eddy, 2004. *Wastewater Engineering Treatment and Reuse (fourth edition)*. Mc Graw Hill. Singapura.
- Midwest Research Institute. 1979. Models for Traffic Counting in the Medium and Large City. Department of Transport.
- Mulyatno, I. Pujo, S. Joko Sisworo, D. S. Panuntun. 2013. Kajian Teknis Dan Ekonomis Penggunaan Dual Fuel System (LPG-Solar) Pada Mesin Diesel Kapal Nelayan Tradisional. *Jurnal Kapal- Vol. 10, No.2*.
- Mustari, A.H. 1992. Water Birds in the Mangrove Forest of Cimanuk River Delta. *Media Konservasi. Vol IV (1)*. October 1992: 39-46.
- Noor, Y.R., M. Khazali, I.N.N. Suryadiputra. 2012. Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Edisi ketiga. Ditjen. PHKA & Wetland International Indonesia Programme, Bogor.
- Noorrahman, N., R. Munawir, F. Almarta. 2015. Tanah Timbul di Kota Cirebon, Peluang dan Tantangan, Institute Teknologi Bandung, Bandung.
- Notoatmojo, 2003, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prinsip Prinsip Dasar, PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Nurdjito, M. & I. Maryanto, 2001. Jenis-jenis Hayati Yang Dilindungi Perundang-undangan Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan LIPI. Bogor.
- Odum, E.P. 1975. *Ecology. Second Edition*. Rinehard & Winston, London.
- Payne, J, C. M. Francis, K. Phillipps, & S. N. Kartikasari. 2000. Panduan Lapangan Mamalia di Kalimantan, Sabah, Sarawak dan Brunei Darussaalam. The Sabah Society, Wildlife Conservation Society dan WWF Malaysia. Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon. 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Pemerintah Kabupaten Cirebon, Cirebon.

- Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, 2014. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Cirebon, Cirebon.
- Petakala Grage. 2009. <http://petakalagrage.blogspot.co.id/2009/10/inventarisasi-burung-air-dipantai-utara.html>.
- Prayitno, H dan L Arsyad. 1987. Petani Desa dan Kemiskinan. BPFE : Yogyakarta.
- Prihandoko, A. Jahi, D. S Gani, I.G. P. Purnaba, L. Adrianto, dan I. Tjitradjaja. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nelayan Artisanal dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat . Jurnal Penyuluhan. Vol. 8 No. 2.
- PT. Cirebon Electric Power, 2008. Analisis Dampak Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 x 660 MW, Kabupaten Cirebon. PT. Cirebon Electric Power, Cirebon.
- PT. Cirebon Electric Power, 2012. Preliminary Environmental Impact Assessment of Cirebon Power Complex Expansion.PT. Cirebon Electric Power, Cirebon.
- PT. Cirebon Electric Power, 2014. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL RPL) PLTU Cirebon Semester I tahun 2014.PT. Cirebon Electric Power, Cirebon.
- PT. Cirebon Electric Power, 2014. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL RPL) PLTU Cirebon Semester II tahun 2014.PT. Cirebon Electric Power, Cirebon.
- PT. Cirebon Electric Power, 2013. Pre-Feasibility Study Report for Cirebon Expansion CFSP 1.000 MW.PT. Cirebon Electric Power.
- PT. Nusantara Regas. 2011. Studi AMDAL Kegiatan Proyek Pembangunan Floating Storage Regasification Terminal (SFRT) Jawa Barat di Lepas Pantai DKI Jakarta dan Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, PT Nusantara Regas, Jakarta.
- Rahayu S, Widodo RH, van Noordwijk M, Suryadi I dan Verbist B. 2009. Monitoring air di daerah aliran sungai. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - Southeast Asia Regional Office.
- Rau, J.G and D.C. Wotten. 1980. Environmental Impact Analisis Handbook. McGraw-Hill. New York.
- Sajogyo, P. 1983. Sosiologi Pedesaan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Samin. 2006. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penerbitan Universitas Muhammadiyah (UMM Press). Malang.
- Schmidt, F.H. and J.H.A. Ferguson. 1951. Rainfall Types Based on Wet and Dry Ratios For Indonesia. Djawatan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta.
- SCP Transportation Planning: Infrastructure Design. <http://scptransport.co.uk/faqs/passenger-car-unit-pcu/> diakses pada Januari 2016.
- Setiawan, N. (2007). Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin Dan Tabel Krejcie - Morgan: Telaah Konsep Dan Aplikasinya. (on-line). Tersedia : http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/03/penentuan_ukuran_sampel_memakai_rumus_slovin.pdf.
- Silvus, M.J. 1989. *Conservation of migratory water birds in Indonesia*. Not published.
- Slamet, J.L., 1994. Kesehatan Lingkungan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soedarto P. Hadi, 1995. Aspek Sosial Amdal, Sejarah, Teori dan Metode, Gajah Mada university Press, Yogyakarta.
- Soekanto, S., 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemarwoto, O. 1989. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Soerianegara, I dan Andry, I. 2002. Ekologi Hutan Indonesia. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Soeryani, M. 1988. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sorensen, J.C. 1971. A Framework for the Identification and Control of Resources Degradation and Conflict in the Multiple Use of the Coastal Zone. Departmen or Landscape Architecture. Univ. California, Berkeley, USA.
- Sosrodarsono, S. and Takeda, K. 1983. Hidrologi Untuk Pengairan. Pradnya Parameterita. Jakarta Pusat.
- Sucipto, C. D., & Asmadi.,2011. Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Amdal. Yogyakarta: Gosyen.
- Sukma, A. Firstiana. 2015. Efek Pengganda Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Perekonomian Provinsi Bali. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 26, no. 2, hlm. 100-110.
- Suprpto, S.A. 1988. Analisis Dampak Sosial; Memperkirakan dan Mencegah Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan Sosial. HIPIIS Jakarta.
- Supriatna, J. 1995. Ular berbisa Indonesia (Venomous snakes in Indonesia). Bhratara, Jakarta.
- Suratmo, F.G. 1990. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- US-EPA, 1995. AP-42, Fifth Edition, Volume 1 Chapter 13: Miscellaneous Sources, Section 13.4 Wet Cooling Towers.
- US-EPA, 2002. Emission factor for Unpaved Road.
- Van Kampen, P. N. 1923. *The Amphibia of Indo-Australian Archipelago*. E.J Brill, Ltd, Leiden.
- Whitmore, T.C. dan I.G.M. Tantra, 1986. Tree Flora of Indonesia. Forest Research and Development Centre. Bogor.
- WHO (World Health Organization). 1982. Rapid Assesment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. WHO. Geneva.
- Wischmeier, W.H., and D.D. Smith. 1978. Predicting Reinfall Erosion Losses – A Guide to Conservation Planning. USDA Agric. New York

ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1.1000 MW Cirebon
Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
Oleh PT Cirebon Energi Prasarana

LAMPIRAN 1

SKKLH dan Izin Lingkungan



PT CIREBON ENERGI PRASARANA

Wisma Pondok Indah Tower 3, Lt. 25

Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V – TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan Telp : 021 2932 7990, Fax : 021 2932 7991

Email : amdal@cepr.co.id



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 660/ 07/ 19.1.05.0/DPMPTSP/2017

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
OPERASIONAL PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP KAPASITAS 1 x 1.000 MW
CIREBON DI KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH
KABUPATEN CIREBON OLEH PT. CIREBON ENERGI PRASARANA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/ atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa pemrakarsa kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa rencana kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- e. bahwa studi Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan kelayakan lingkungan hidup;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 31 Seri E)

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Juni 2017 dan tanggal 6 Juli 2017, mengenai penilaian dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana;
 2. Surat Ketua Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 660.1/3.852/Bid-I/2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Rekomendasi Penilaian Studi Addendum ANDAL, RKL dan RPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimuat dalam dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon, yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana.
- KETIGA : PT. Cirebon Energi Prasarana dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
- KEEMPAT : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, PT. Cirebon Energi Prasarana wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Desa setempat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 X 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat mengenai kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon secara berkesinambungan;
 3. menggunakan bahan material untuk pelaksanaan kegiatan bersumber dari *quarry* yang berizin/legal;
 4. menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut.

- KELIMA : Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasi PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEENAM : Keputusan ini wajib ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin Lingkungan serta mengajukan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahap operasional kegiatan, yaitu:
- Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut.
- KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak di luar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada:
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon; dan/atau
 - Instansi lain yang terkait kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bandung
pada tanggal : 13 JUL 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, M.SCE.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601217 198511 1002



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 660/08/19.1.05.0/DPMPPTSP/2017**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP KAPASITAS 1 X 1.000 MW CIREBON
KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH
KABUPATEN CIREBON OLEH PT. CIREBON ENERGI PRASARANA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT.Cirebon Energi Prasarana, telah diterbitkan izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017;
 - c. bahwa Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan apabila kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/ atau rencana rincinya, maka izin pemanfaatan ruang tersebut akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penuaan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 31 Seri E);
16. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor.660/07/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT.Cirebon Energi Prasarana.

- Memperhatikan: 1. Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor S-112/M.EKON/05/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Penjelasan Atas Ketentuan Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.
2. Surat Rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nomor 2127/9.1/V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
3. Surat Klarifikasi dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nomor 194/SRT/200.11/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017;
4. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU UM.01.01-623 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pertimbangan dan Tanggapan atas Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 (1 x 1000 MW di Kecamatan Mundu).
5. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 660.1/3.895/Bid-I/2017 tanggal 11 Juli 2017, hal Pertimbangan Teknis Studi Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh PT. Cirebon Energi Prasarana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional, PLTU Kapasitas 1 X 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana.

KEDUA : Memberikan Izin Lingkungan, kepada:

1. Nama : PT. Cirebon Energi Prasarana
Perusahaan
2. Jenis Usaha : Kegiatan Pembangunan dan
dan/atau Operasional PLTU
Kegiatan
3. Penanggung Jawab : Presiden Direktur PT. Cirebon
Energi Prasarana

4. Alamat Kantor : Pondok Indah Office Tower 3, Suite 2502 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia Telp. (021) 2765 0795, Fax. (021) 2765 0796
5. Lokasi Kegiatan : Daerah Kabupaten Cirebon
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Ruang lingkup kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dimuat dalam dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon, dengan matriks addendum Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sebelum melaksanakan operasional kegiatan, PT Cirebon Energi Prasarana wajib memiliki perizinan lain terkait operasional kegiatan yang diterbitkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PT Cirebon Energi Prasarana dalam melaksanakan kegiatannya, wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen addendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, serta bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, PT Cirebon Energi Prasarana wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, dan Pemerintah Desa setempat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 X 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon;

2. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat mengenai kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon secara berkesinambungan; dan
3. pendokumentasian seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 X 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon.

KETUJUH : Jangka waktu pemberlakuan Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan jangka waktu Izin Usaha kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, wajib mengajukan permohonan perubahan atas Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada:

- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon; dan
- d. Instansi lain yang terkait kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon.

KESEPULUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan menimbulkan dampak diluar dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, Pemegang Izin Lingkungan wajib melaporkan kepada Instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung
pada tanggal : 17 Juli 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, M.SCE.
Pembina Utama Madya
NIP.19601217 198511 1002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 660/08/19.1.05.0/DPMP/2017
 TANGGAL : 17 Juli 2017
 TENTANG : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP KAPASITAS 1 X 1.000 MW CIREBON KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH KABUPATEN CIREBON OLEH PT. CIREBON ENERGI PRASARANA

A MATRIKS ADDENDUM RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL PLTU KAPASITAS 1 X 1.000 MW CIREBON KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN KECAMATAN MUNDU DAERAH KABUPATEN CIREBON OLEH PT CIREBON ENERGI PRASARANA

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Beitrak Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting Yang Dikelola							
A. TAHAP PRA KONSTRUKSI							
1.	Perubahan mata pencaharian	Pengadaan lahan	Terciptanya lapangan kerja dan/atau sumber nafkah baru bagi warga penyewa / penggarap lahan garam atau ikan, dan sawah yang kehilangan sumber mata pencahariannya.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi terkait rencana pengadaan lahan secara transparan kepada para penggarap lahan milik KLHK yang akan digunakan untuk lokasi tapak proyek PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW. Melakukan pendataan secara rinci/detil terkait kepemilikan dan penguasaan lahan di areal lahan yang dibebaskan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> jumlah pemilik lahan yang akan terkena pembebasan, Jumlah penggarap lahan (tambah garam, tambah ikan, dan sawah) di lahan KLHK seluas ± 195 ha, 3). Luas lahan milik dan lahan garapan yang dibebaskan. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pengadaan lahan Tahap Pra Konstruksi dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan musyawarah dengan para pemilik lahan yang dibebaskan terkait dengan nilai jual-beli lahan (terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan di tanah timbul yang dikuasai oleh warga sekitar). ▪ Membantu KLHK melakukan pendekatan dan musyawarah dengan para penggarap lahan terkait dengan besaran tali asih lahan garapan (tambak garam, tambak ikan dan sawah) yang dibebaskan. ▪ Pemrakarsa akan berupaya mencari dan menyediakan alternatif pemecahan masalah hilangnya mata pencaharian para penyewa dan/ atau penggarap yang dibebaskan lahan garapannya, setidaknya terdapat beberapa alternatif upaya untuk memecahkan masalah tersebut yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam jangka pendek, pemrakarsa akan mengutamakan para penggarap lahan dan buruh tani yang kehilangan sumber mata pencaharian agar diterima menjadi tenaga kerja pada kegiatan konstruksi pembangunan PLTU selama ± 2 tahun, 2. Pemrakarsa bekerjasama dengan 		<p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pengadaaan lahan Tahap Pra Konstruksi dilakukan</p> <p>Selama Tahap Pra Konstruksi</p> <p>Selama Tahap Pra Konstruksi</p>	

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menciptakan peluang berusaha baru bagi para penggarap lahan (petambak garam, petambak ikan, dan petani sawah) yang terkena pembebasan lahan dengan memperhatikan potensi, minat dan peluang berusaha yang tersedia.</p> <p>3. Upaya pengelolaan diprioritaskan kepada kelompok rentan yaitu kepada:</p> <p>1). Penggarap lahan di areal 195 Ha yang berusia lanjut (berusia di atas 54 tahun) yang kemungkinannya kecil untuk dapat direkrut atau bekerja pada kegiatan Tahap Konstruksi dan Tahap Operasi PLTU, 2). Penggarap lahan di areal 195 ha yang tidak memiliki mata pencaharian lain dan/atau yang sumber pendapatannya dominan bergantung dari lahan garapan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensosialisasikan mekanisme pengaduan yang berkaitan dengan pengadaan lahan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembebasan 	<p>Blok Kandawuru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan</p>	<p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pengadaan lahan Tahap Pra Konstruksi</p>	

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Perubahan pendapatan	Pengadaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terjadinya kehilangan atau penurunan tingkat pendapatan warga yang selama ini menggarap lahan di areal yang dibebaskan baik sebagai petambak garam, petambak ikan, dan petani sawah beserta dengan buruh tambak/tani. Setelah dilakukan kegiatan pembebasan lahan, tingkat pendapatan warga penggarap lahan minimal sama atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan sebelum dilakukannya pembebasan lahan. 	<p>lahan,</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memberikan prioritas utama kepada para penggarap lahan yang kehilangan mata pencaharian dalam perekrutan tenaga kerja pada Tahap Konstruksi. Mengupayakan peluang usaha baru bagi para penggarap yang kehilangan mata pencaharian. Melakukan jalinan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal dalam pengupayaan peluang usaha baru untuk peningkatan pendapatan masyarakat. 	<p>Desa Pengarengan</p> <p>Blok Kandangwaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan</p> <p>Desa Pengarengan</p>	<p>dilakukan</p> <p>Selama Tahap Pra Konstruksi berlangsung</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
3.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pengadaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya persepsi positif masyarakat (terutama para penggarap lahan) terhadap rencana pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1 x 1.000 MW, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan lahan. Terciptanya kondisi 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan semua pengelolaan dampak hilangnya mata pencaharian dan penurunan pendapatan di atas dengan baik dan benar. Membangun wadah kelembagaan bersama (bisa berupa forum) yang terdiri atas pemrakarsa, para penggarap, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah (desa, kecamatan dan kabupaten) untuk 	<p>Blok Kandangwaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan</p> <p>Desa Pengarengan</p>	<p>Selama Tahap Pra Konstruksi berlangsung</p> <p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pembebasan lahan dimulai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Sosial Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Sosial Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>lingkungan sosial yang semakin harmonis dan kondusif.</p>	<p>mencari alternatif terbaik pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembebasan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensosialisasikan atau mengkomunikasikan proses dan hasil kegiatan pengadaan lahan kepada <i>stakeholders</i> terkait (masyarakat yang terkena pembebasan lahan, aparat pemerintahan desa dan kecamatan). 		<p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan pembebasan lahan dimulai</p>	
4.	Peningkatan kesempatan kerja	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	Minimum 40% dari kebutuhan tenaga kerja konstruksi diprioritaskan dari tenaga kerja lokal.	<p>Penerimaan tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan mengutamakan warga lokal sesuai dengan kualifikasi dan ketersediaan lapangan kerja, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerimaan tenaga kerja secara transparan dan memberikan kesempatan kerja dan prioritas utama kepada masyarakat di 5 desa studi, minimum sebesar 40% dari total tenaga kerja yang akan diserap pada Tahap Konstruksi. ▪ Memasang papan pengumuman secara terbuka di balai desa dan kantor kecamatan yang berkaitan dengan lowongan dan jenis pekerjaan yang dapat diisi masyarakat lokal. ▪ Pemrakarsa dan kontraktor akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan 	<p>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan</p>	<p>Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung</p> <p>3 (tiga) bulan sebelum kegiatan penerimaan tenaga kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: PT. CEPR ▪ Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon ▪ Penerima Laporan : DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>lembaga "Komite Tenaga Kerja Lokal" yang telah dibangun sejak PLTU Cirebon kapasitas 1 x 660 MW dalam melakukan proses perekrutan tenaga kerja lokal, agar proses perekrutan tenaga kerja lokal benar-benar telah memperhatikan dan memprioritaskan pencari kerja yang berasal dari komunitas masyarakat, terutama yang berada dalam ring 1 di desa-desa yang termasuk dalam wilayah studi, dengan tingkat prioritas sebagai berikut :</p> <p>Prioritas utama : warga yang kehilangan mata pencaharian sebagai dampak dari kegiatan pengadaaan lahan, yaitu para penggarap lahan untuk kegiatan tambak garam, tambak ikan dan sawah di areal KLHK beserta dengan buruh-buruh yang terlibat dalam kegiatan tersebut,</p> <p>Prioritas kedua : warga pencari kerja (pengangguran) di 5 (lima) desa studi, terutama komunitas yang berbatasan langsung dengan tapak proyek dan diprediksi akan terkena dampak negatif langsung dari kegiatan konstruksi.</p> <p>Prioritas ketiga, pencari kerja yang berasal dari kecamatan sekitarnya di</p>		berlangsung	

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.	Persepsi dan sikap masyarakat	Penerimaan tenaga kerja untuk Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Berkurangnya persepsi negatif dari masyarakat pencari kerja. Rendahnya intensitas keluhan dan protes masyarakat atas rencana pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1x1.000 MW 	<p>Kabupaten Cirebon.</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat terkait jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pada Tahap Konstruksi. Pemrakarsa memberikan pelatihan keterampilan bagi para pekerja lokal sesuai dengan kebutuhan oleh kegiatan konstruksi, seperti pelatihan keterampilan mengelas, menyambung pipa, memasang peralatan listrik, dan lainnya. 	Blok Kawadawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Pra Konstruksi dimulai.	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon Penerimaan Laporan: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
B. TAHAP KONSTRUKSI							
1.	Penurunan kualitas udara ambient	Mobilisasi peralatan dan material	Kualitas udara ambient memenuhi baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan kendaraan proyek yang laik jalan; Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi alat dan material terutama di permukiman maks. 20 km/jam sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; Proses pengangkutan material (tanah gali/ urug) dilengkapi dengan penutup terpal pada saat melewati daerah pemukiman; Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam 	Di sepanjang jalur akses mobilisasi alat dan material; Pintu keluar masuk ke lokasi tapak proyek;	<p>Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung pada Tahap Konstruksi</p> <p>Rambu lalu lintas dipasang sebelum dan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material</p> <p>Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung pada Tahap Konstruksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kab. Cirebon Penerimaan Laporan: DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				waktu yang berdekatan (tidak beriringan); <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perawatan mesin kendaraan secara berkala sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; Melakukan penyiraman minimal dua kali sehari menggunakan <i>water spraying truck</i> pada ruas jalan akses yang tidak diaspal yang dilalui kendaraan pengangkut peralatan dan material secara rutin, terutama pada saat musim kemarau dengan mengacu kepada prosedur penyiraman jalan. Membersihkan atau menghilangkan debu pada roda kendaraan dengan <i>wheel washing machine</i>; Mengikuti <i>Standard Operation Procedure</i> pencegahan pencemaran lingkungan hidup. 	alat dan material; Di setiap truk; Sepanjang 600 m di jalan akses lokasi tapak proyek;	Minimal 2 kali sehari setiap pagi dan siang pada musim kemarau	
					Jalan akses masuk proyek dan di dalam lokasi tapak proyek	<i>Wheel washing machine</i> dipasang sebelum dan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material	
					Di sepanjang jalur akses mobilisasi alat dan material;	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung pada Tahap Konstruksi	

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi peralatan dan material	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu yang sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan kendaraan proyek yang laik jalan, termasuk penggunaan <i>exhaust muffler</i> (tabung knalpot). ▪ Pengaturan jarak kendaraan pengangkut tidak dalam waktu yang berdekatan (tidak beriringan); ▪ Pengaturan kecepatan kendaraan pengangkut di jalur mobilisasi alat dan material, terutama di permukiman maks. 20 km/jam; ▪ Perawatan mesin kendaraan secara berkala sesuai dengan prosedur baku dan ketentuan yang berlaku; 	Di sepanjang jalur akses mobilisasi alat dan material, terutama yang berdekatan dengan permukiman penduduk di Desa Waruduwur (Blok Kandawaru) dan Desa Astanamukti	Selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material berlangsung pada Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: PT. CEPR ▪ Pengawas: DLH Kab. Cirebon ▪ Penerima Laporan: DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
3.	Peningkatan peluang usaha	Mobilisasi peralatan dan material	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terdampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru. ▪ Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa penyediaan makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: PT. CEPR ▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon ▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	Gangguan aktivitas nelayan pinggiran, nelayan yang melaut, dan pembuat terasi	Mobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang berkaitan dengan rute lalu lintas kapal/perahu nelayan pergi-pulang melaut. Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang beroperasi pada jarak 0 – 1 mil laut dari garis pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi kegiatan mobilisasi peralatan dan material kepada masyarakat nelayan dan terkait peta pelayaran di sekitar tapak proyek; Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas laut; Melakukan musyawarah secara mufakat (tanpa melalui perantara) terkait rumpon yang terdampak oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material supaya nelayan tetap dapat menjalankan aktifitas budidaya kerang hijau tanpa perlu melintas di area mobilisasi peralatan dan material. 	<p>Perkampungan nelayan di wilayah studi</p> <p>Jalur mobilisasi peralatan dan material di wilayah kegiatan</p> <p>Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan.</p>	<p>2 (satu) bulan sebelum kegiatan mobilisasi peralatan dan material</p> <p>2 (dua) minggu sebelum kegiatan mobilisasi peralatan dan material dimulai</p> <p>1 (satu) bulan sebelum kegiatan mobilisasi peralatan dan material dimulai</p>	<p>Pelaksana: PT. CEPR</p> <p>Pengawas: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon</p> <p>Penerima Laporan: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon, DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.</p>
5.	Perubahan pendapatan	Mobilisasi peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW Tidak terjadinya penurunan pendapatan para 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK) Memberikan peluang berusaha kepadamasyarakat lokal yang berminat 	<p>Desa Kanci Kulon</p> <p>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan</p>	<p>Sebelum dan selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material</p> <p>Selama Tahap Konstruksi berlangsung</p>	<p>Pelaksana: PT. CEPR</p> <p>Pengawas: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cirebon</p> <p>Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cirebon, DLH</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
19.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pembangunan jalan akses	Tidak terdapat keluhan warga akibat pembangunan jalan akses	<p>penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan jalan akses (peningkatan kebisingan). ▪ Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari pembangunan jalan akses melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	<p>Selama Tahap Konstruksi berlangsung</p> <p>Sebelum kegiatan konstruksi dimulai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: PT. CEPR ▪ Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon ▪ Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon dan BPLHD Provinsi Jawa Barat.
20.	Peningkatan peluang usaha	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru. ▪ Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam penyediaan jasa makanan/katering dan rumah kontrakan atau pemondokan bagi pekerja pada Tahap Konstruksi. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: PT. CEPR ▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon ▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
21.	Perubahan pendapatan	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	Terdapat peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena dampak yang teresap dalam Tahap Konstruksi 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: PT. CEPR ▪ Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon ▪ Penerima Laporan:

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
22.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pembangunan PLTU dan fasilitasnya	1.000 MW Tidak terdapat keluhan warga akibat pembangunan PLTU dan fasilitasnya	<p>minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK)</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan peluang berusaha kepada masyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi. Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan PLTU dan fasilitasnya (peningkatan peluang usaha). Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari pembangunan jalan akses melalui forum komunikasi para pemangku kepentingan. Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru. Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa 	Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
23.	Peningkatan peluang usaha	Pembangunan dermaga	Semakin bertambahnya jumlah dan jenis wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru, baik perorangan atau kelompok, yang bersumber terutama dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru. Mengutamakan kemitraan dengan lembaga ekonomi lokal, seperti koperasi dan pengusaha lokal dalam usaha penyediaan jasa 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Sejak Tahap Konstruksi dimulai	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kab. Cirebon, DLH Kabupaten Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
24.	Gangguan aktivitas nelayan pinggir, nelayan yang melaut, dan pembuatan terasi	Pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang berkaitan dengan rute lalu lintas kapal/perahu nelayan pergi-pulang melaut. ▪ Tidak terdapat keluhan dari nelayan yang beroperasi pada jarak 0 - 1 mil laut dari garis pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi kegiatan pembangunan dermaga kepada masyarakat nelayan dan terkait peta pelayaran di sekitar tapak proyek; ▪ Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas laut; ▪ Melakukan musyawarah secara mufakat (tanpa melalui perantara) terkait rumpun yang terdampak oleh kegiatan pembangunan dermaga supaya nelayan tetap dapat menjalankan aktifitas budidaya kerang hijau tanpa perlu melintas di area pembangunan dermaga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkampungan nelayan di wilayah studi 2. Area pembangunan dermaga di wilayah kegiatan 3. Desa Waruduwur (Blok Kandawaru), Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan. 	<p>2 (satu) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga</p> <p>2 (dua) minggu sebelum kegiatan pembangunan dermaga dimulai</p> <p>1 (satu) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga dimulai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: PT. CEPR ▪ Pengawas: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon ▪ Penerima Laporan: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Cirebon, DLH Kab. Cirebon dan DLH Provinsi Jawa Barat.
25.	Gangguan aktivitas budidaya kerang	Pembangunan dermaga (permanen)	Tidak terdapat keluhan dari nelayan budidaya kerang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembinaan dan pemberdayaan nelayan pinggir laut pencari ikan, udang kecil (rebon), kerang dan pembuatan terasi; 1) Melakukan sosialisasi kepada nelayan budidaya kerang hijau terkait rumpun yang terkena dampak pembangunan dermaga permanen, 2) Melakukan koordinasi dengan pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Perkampungan nelayan di wilayah studi <p>Perkampungan nelayan di wilayah studi</p> <p>Blok Kandawaru (Desa Waruduwur),</p>	<p>Sebelum dan selama kegiatan pembangunan dermaga</p> <p>2 (dua) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga</p> <p>Selama pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: PT. CEPR ▪ Pengawas: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon ▪ Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon, Dinas

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
26.	Perubahan pendapatan	Pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> Terjadinya peningkatan pendapatan warga di sekitar pembangunan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW Tidak terjadinya penurunan pendapatan para nelayan. 	<p>(Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon) terkaitbudidaya Tengyong (Kerang Hijau) di wilayah sekitar proyek sesuai dengan peraturan berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan upah/kepada masyarakat lokal terkena dampak yang terserap dalam Tahap Konstruksi minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku (minimal UMP/UMK) Memberikan peluang berusaha kepadamasyarakat lokal yang berminat berusaha dalam penyediaan kebutuhan bagi tenaga kerja seperti penyediaan makanan dan katering dan akomodasi bagi para pekerja konstruksi akan lebih baik kerjasama tersebut melalui lembaga koperasi. 	Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	dermaga	Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon serta DLH Provinsi Jawa Barat.
27.	Persepsi dan sikap masyarakat	Pembangunan dermaga	Tidak terdapat keluhan warga akibat pembangunan dermaga	<p>Melakukan pengelolaan dampak primer kegiatan pembangunan dermaga (peningkatan peluang usaha, gangguan aktivitas nelayan melaut, dan gangguan aktivitas budidaya kerang)</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan sosialisasi tentang mekanisme pengaduan dan penanganan keluhan masyarakat nelayan yang berkaitan dengan pembangunan dermaga. 	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur), Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Selama Tahap Konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: DLH Kabupaten Cirebon Penerima Laporan: DLH Kabupaten Cirebon
28.	Perubahan pendapatan	Pelepasan tenaga kerja Tahap	Tidak terjadinya penurunan signifikan	Melaksanakan kegiatan pelepasan tenaga kerja	Blok Kandawaru (Desa Waruduwur),	2 (dua) bulan sebelum kegiatan pembangunan dermaga	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksana: PT. CEPR Pengawas: Dinas

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Konstruksi	<p>pendapatan rumah tangga para tenaga kerja lokal yang terkena PHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya keluhan dari tenaga kerja yang terkena PHK. 	<p>sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan informasi tentang rencana pelepasan tenaga kerja minimal 6 bulan sebelumnya agar para pekerja dapat mempersiapkan diri untuk mencari alternatif mata pencaharian lain. ▪ Mengupayakan terciptanya peluang usaha baru melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, misalnya Dinas Tenaga Kerja. ▪ Meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat kerjasama dengan Pemerintah Daerah. 	Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanamukti, dan Desa Pengarengan	Konstruksi.	<p>Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dan DLH Kabupaten Cirebon.
29.	Peningkatan keterampilan	Pelepasan tenaga kerja Tahap Konstruksi	Terjadinya peningkatan keterampilan/keahlian tenaga kerja lokal setelah pelepasan tenaga kerja.	<p>Mengupayakan kegiatan pelatihan keterampilan kepada tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan minat/kebutuhan, bakat dan potensi tenaga kerja lokal serta potensiusaha yang dapat dikembangkan di sekitar lokasi kegiatan.</p>	PT. CEPR., khususnya bidang yang menangani pengembangan sumberdaya manusia perusahaan.	Selama Tahap Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksana: PT. CEPR ▪ Pengawas: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon ▪ Penerima Laporan: Dinas Tenaga Kerja dan DLH Kabupaten Cirebon.